



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



BUKU PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024



PADANG, TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenanNya, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, pada pasal 4 mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini diterbitkan untuk memenuhi amanat tersebut sekaligus memberikan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini adalah data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data yang dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2024, data perkembangan kependudukan Kabupaten/Kota, dan data pendukung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi teknis terkait, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, serta Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran, serta untuk evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dan penduduk harus dijadikan titik

sentral dalam proses pembangunan serta penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Dengan kata lain pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Disisi lain, pembangunan juga harus semakin menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pembangunan infrastruktur.

Disadari bahwa penyajian data dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini diucapkan terima kasih. Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 13 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat



Drs. Besri Rahmad, M.M.

Pembina Utama Madya/NIP.1966019 198602 1 006



MAHYELDI
GUBERNUR SUMATERA BARAT



VASKO RUSEIMY

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	11
A. Letak Geografis Daerah	11
B. Kondisi Demografis Daerah	13
C. Gambaran Ekonomi Daerah	18
D. Potensi Daerah	21
BAB III SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN	27
A. Sumber Data	27
B. Komponen Kependudukan	28
1. Kuantitas Penduduk	28
a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	29
1) Jumlah Penduduk	30
2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	32
a) Umur Median (<i>Median Age</i>)	35
b) Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	37
c) Piramida Penduduk	40
d) Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	43
3) Rasio Kepadatan Penduduk (<i>Population Density Ratio</i>)	46
4) Angka Pertumbuhan Penduduk	48
b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	50
1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	50
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	53
3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas	56
4) Penduduk Menurut Status Kawin	60
a) Angka Perkawinan Kasar	63

b) Angka Perkawinan Umum	65
c) Angka Perceraian Kasar (<i>Divorce</i>)	66
d) Angka Perceraian Umum	67
c. Keluarga	69
1) Jumlah keluarga dan Rata-rata	
Jumlah Anggota Keluarga	69
2) Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK) ..	71
3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	72
4) Karakteristik Kepala Keluarga	
Berdasarkan Jenis Kelamin	74
5) Karakteristik Kepala Keluarga	
Berdasarkan Status Kawin	76
6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan ..	79
7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja	81
d. Kelahiran (Fertilitas)	84
1) Jumlah Kelahiran	84
2) Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate/ CBR</i>)	86
e. Kematian (Mortalitas)	87
1) Jumlah Kematian	88
2) Angka Kematian Kasar (<i>Crude Death Rate/CDR</i>)	89
2. Kualitas Penduduk	90
a. Kesehatan	90
1) Kelahiran (Fertilitas)	90
a) Angka Kelahiran Menurut Umur	
(<i>Age Spesific Fertility Rate/ ASER</i>)	90
b) Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) ..	92
c) Rasio Anak dan Perempuan	
(<i>Child women Ratio/ CWR</i>)	93
2) Kematian (Mortalitas)	95
a) Angka Kematian Bayi	
(<i>Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB</i>)	95
b) Angka Kematian Neonatal	
(<i>Neo-Natal Death Rate/ NNDR</i>)	98
c) Angka Kematian Post Neonatal	
(<i>Post Neo-Natal Death Rate/ PNNDNR</i>)	99
d) Angka Kematian Anak	100
e) Angka Kematian Balita	102
f) Angka Kematian Ibu	
(<i>Maternity Mortality Rate/ AKI</i>)	103
b. Pendidikan	105
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)	106
2) Angka Partisipasi Murni (APM)	108
3) Angka Putus Sekolah (APS)	109

c. Ekonomi	111
1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)	111
a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	111
b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Tidak Bekerja)	113
2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	114
3) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan	116
4) Pengangguran Terbuka	120
d. Sosial	121
1) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	121
2) Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas	124
3. Mobilitas Penduduk	126
a. Angka Migrasi Masuk (immigration/Mi)	127
b. Angka Migrasi Keluar (out-migrasi/Mo)	129
c. Angka Migrasi Neto (net-migration/Mn)	131
d. Transmigrasi	132
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan	137
a. Kepemilikan Kartu Keluarga	137
b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	138
c. Kepemilikan Akta	140
1) Kepemilikan Akta Kelahiran	140
2) Kepemilikan Akta Perkawinan	143
3) Kepemilikan Akta Perceraian	144
4) Kepemilikan Akta Kematian	146

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA	150
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 14
Tabel 2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 16
Tabel 3	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024 32
Tabel 4	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024 34
Tabel 5	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 36
Tabel 6	Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 38
Tabel 7	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 39
Tabel 8	Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 45
Tabel 9	Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 47
Tabel 10	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 49
Tabel 11	Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 52
Tabel 12	Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 54
Tabel 13	Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 55
Tabel 14	Distribusi Penduduk Menurut Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 56
Tabel 15	Distribusi Penduduk Menurut Jenis Disabilitas dan Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 59
Tabel 16	Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 60
Tabel 17	Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 61
Tabel 18	Angka Perkawinan Kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 64
Tabel 19	Angka Perkawinan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 65

Tabel 20	Angka Perceraian Kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	67
Tabel 21	Angka Perceraian Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	68
Tabel 22	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	71
Tabel 23	Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	72
Tabel 24	Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	74
Tabel 25	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	75
Tabel 26	Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	77
Tabel 27	Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	81
Tabel 28	Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	82
Tabel 29	Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	85
Tabel 30	Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate/CBR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	87
Tabel 31	Jumlah Kematian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	88
Tabel 32	Angka Kematian Kasar (<i>Crude Death Rate/CDR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	89
Tabel 33	Angka Kelahiran Menurut Umur (<i>ASFR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	91
Tabel 34	Angka Kelahiran menurut Umur (<i>ASFR</i>) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	92
Tabel 35	Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ratio/CWR</i>) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	94
Tabel 36	Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	97
Tabel 37	Angka Kematian Neonatal (<i>Neo-Natal Death Rate/NDR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	98
Tabel 38	Angka Kematian Post Neonatal (<i>Post Neo-Natal Death Rate/ PNNDR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	100
Tabel 39	Angka Kematian Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	101
Tabel 40	Angka Kematian Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	102
Tabel 41	Angka Kematian Ibu (<i>Maternal Mortality Rate/MMR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	104
Tabel 42	Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	105
Tabel 43	Angka Partisipasi Kasar (<i>APK</i>)/ <i>Gross Enrollment Ratio</i> (<i>GER</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	107

Tabel 44	Angka Partisipasi Murni (APM)/ <i>Net Enrollment Ratio (NER)</i> Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	109
Tabel 45	Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	110
Tabel 46	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	113
Tabel 47	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	114
Tabel 48	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	116
Tabel 49	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	119
Tabel 50	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	120
Tabel 51	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	122
Tabel 52	Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	123
Tabel 53	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 ..	124
Tabel 54	Angka Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	126
Tabel 55	Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	128
Tabel 56	Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	130
Tabel 57	Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	132
Tabel 58	Data Transmigran Masuk dan Keluar Berdasarkan Penempatan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	134
Tabel 59	Data Transmigran Masuk dan Keluar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	135
Tabel 60	Transmigran Berdasarkan Jenis Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	136
Tabel 61	Transmigran Berdasarkan Pola Transmigrasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2024	137
Tabel 62	Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	138
Tabel 63	Kepemilikan KTP-EL Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	139
Tabel 64	Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	141
Tabel 65	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	142

Tabel 66	Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	143
Tabel 67	Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	145
Tabel 68	Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024	146

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	17
Gambar 2 Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, energi, meningkatnya kebutuhan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatnya persaingan lapangan kerja, semakin sempitnya lapangan dan peluang kerja, meningkatnya pengangguran khususnya bagi mereka yang tidak mampu bersaing.

Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut sudah barang tentu diperlukan data kependudukan yang benar, valid, dan akurat. Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi kependudukan seperti jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk serta persebarannya.

Tersedianya data kependudukan yang baik, dalam arti mampu mengobservasikan peristiwa-peristiwa vital, kelahiran, kematian, dan perpindahan dirasakan semakin penting dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi mengenai kependudukan yang sudah cukup lama dan tersebar di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan sudah banyak dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Apabila data dan informasi yang ada tersebut berhasil diintegrasikan secara menyeluruh, niscaya akan menjadi

aset sekaligus informasi yang berarti untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Komposisi data penduduk yang senantiasa berubah, wajib dimutakhirkan dan divalidasi secara berkelanjutan melalui mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dimana saat ini telah terbangun dalam suatu SIAK terpusat dan telah terintegrasi dengan database KTP-el yang telah menjamin ketunggalan data dengan merekam data *biometric* penduduk seperti iris mata dan sidik jari sehingga keakuratan dan kevalidan data semakin tinggi.

Dengan demikian, upaya pengembangan sebuah sistem administrasi kependudukan memang merupakan suatu keharusan karena akan mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan tersedianya database kependudukan, khususnya yang bersumber pada SIAK.

Sejalan dengan itu guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan harus digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan memberikan data dan informasi yang berguna untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan, alokasi anggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan di Sumatera Barat.

TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah :

1. Memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sebagai alat publikasi dan meningkatkan pelayanan publik guna membangun komitmen semua pihak untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi penduduk dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

C. RUANG LINGKUP

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Mobilitas penduduk.
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. PENGERTIAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.
4. **Data** adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam berbagai bentuk media.

5. **Database** kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
6. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
9. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Mobilitas penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah Kabupaten/Kota.
13. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
14. **Struktur penduduk** adalah pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, agama,

status hubungan dalam keluarga, status perkawinan dan lapangan pekerjaan,

15. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
16. **Umur median** adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
17. **Rasio Jenis Kelamin (RJK)** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan.
18. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik.
19. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.
20. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
21. **Pertumbuhan penduduk** adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu, dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai "per waktu unit" untuk pengukuran.

22. **Angka pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persentase (%).
23. **Angka perkawinan kasar** menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.
24. **Angka perkawinan umum (AKU)** menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu.
25. **Angka perceraian kasar (*divorce*)** menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
26. **Angka perceraian umum** menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.
27. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
28. **Kelahiran (*fertilitas*)** merupakan kemampuan memproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*) atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan.
29. **Jumlah kelahiran** didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
30. **Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)** menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
31. **Lahir hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda

- kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
32. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
 33. **Kematian (mortalitas)** adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan.
 34. **Angka kematian kasar (Crude Death Rate/CDR)** merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk.
 35. **Rasio anak dan perempuan (Child Women Ratio/CWR)** adalah rasio antara jumlah anak dibawah 5 tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
 36. **Kematian bayi (infant mortality)** adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun.
 37. **Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)** adalah jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.
 38. **Kematian bayi endogen atau kematian neonatal** adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
 39. **Angka kematian neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)** adalah jumlah kematian neo-natal per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
 40. **Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal** adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang

disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

41. **Angka kematian post neo-natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)** adalah jumlah kematian post neo-natal per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.
42. **Kematian anak** adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari yang dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.
43. **Angka kematian anak** adalah jumlah kematian anak selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
44. **Kematian balita** adalah kematian yang terjadi pada semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang 5 tahun, umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.
45. **Angka kematian balita** adalah jumlah kematian balita selama satu tahun tertentu per 1.000 balita umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
46. **Kematian ibu** adalah kematian yang terjadi pada perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan yang disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.
47. **Angka kematian ibu** adalah banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
48. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.

49. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
50. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
51. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
52. **Angka putus sekolah (APS)** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.
53. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih.
54. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
55. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
56. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
57. **Angka partisipasi angkatan kerja (APAK)** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
58. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.

59. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
60. **Pengangguran terbuka** merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
61. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.
62. **Angka migrasi masuk (*in-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun.
63. **Angka migrasi keluar (*out-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.
64. **Angka migrasi neto (*net-migration*)** adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar.
65. **Migrasi neto positif** adalah apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar.
66. **Migrasi neto negatif** adalah apabila migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk.
67. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada $0^{\circ}54'$ LU - $3^{\circ}30'$ LS dan $98^{\circ}36'$ BT - $101^{\circ}53'$ BT dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- › Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
- › Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.
- › Sebelah Timur dengan Provinsi Riau.
- › Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.119,542 kilometer persegi. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420,357 kilometer dengan luas perairan laut 186.580 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara $22,6^{\circ}\text{C}$ sampai $31,5^{\circ}\text{C}$. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering

mengalami gempa bumi. Beberapa gempa bumi besar terakhir yang terjadi di Sumatera Barat diantaranya adalah gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 999 Desa, dan 230 Kelurahan. Kesembilan belas Kabupaten/Kota itu adalah :

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Desa.
- 2) Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Desa.
- 3) Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dan 61 Desa.
- 4) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Desa.
- 5) Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Desa.
- 6) Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan dan 92 Desa.
- 7) Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Desa.
- 8) Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 Desa.
- 9) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan dan 43 Desa.
- 10) Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan 52 Desa.
- 11) Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 39 Desa.
- 12) Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 90 Desa.
- 13) Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.
- 14) Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan.
- 15) Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Desa, dan 10 Kelurahan.
- 16) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan.
- 17) Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan.

18) Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan.

19) Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan, 55 Desa, dan 16 Kelurahan.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten/Kota terbesar dengan luas wilayah 6.045,649 kilometer persegi atau 14,35 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan Kabupaten/Kota terkecil dengan luas wilayah 23,560 kilometer persegi atau 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 5.820.359 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.923.132 jiwa (50,22 persen) dan perempuan sebanyak 2.897.227 jiwa (49,78 persen). Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan 1 (satu) kota yaitu Kota Padang yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	267.507	266.279	533.786
2	Kabupaten Solok	307.180	305.995	613.175
3	Kabupaten Sijunjung	128.672	122.651	251.323
4	Kabupaten Tanah Datar	191.513	191.161	382.674
5	Kabupaten Padang Pariaman	230.615	227.895	458.510
6	Kabupaten Agam	367.450	365.804	733.254
7	Kabupaten Lingsi Puluh Kota	200.980	201.808	402.788
8	Kabupaten Pasaman	157.676	156.161	313.837
9	Kabupaten Kep. Mentawai	50.832	47.005	97.837
10	Kabupaten Dharmasraya	112.983	119.210	232.193
11	Kabupaten Solok Selatan	92.075	89.450	181.525
12	Kabupaten Pasaman Barat	228.952	228.501	457.453
13	Kota Padang	472.670	474.312	946.982
14	Kota Solok	42.962	42.571	85.533
15	Kota Sawahlunto	34.500	34.059	68.559
16	Kota Padang Pariang	32.189	31.706	63.895
17	Kota Bukittinggi	71.136	70.668	141.804
18	Kota Payakumbuh	73.097	73.980	147.077
19	Kota Patioman	52.524	51.311	103.835
Sumatera Barat		2.933.130	2.897.227	5.830.357

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2024 (dolah)

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk periode Semester I - Semester II Tahun 2024 adalah sebesar 0,55 persen. Sedangkan untuk tingkat Pertumbuhan Penduduk dari Semester II 2023 - Semester II Tahun 2024 adalah sebesar 1,21 persen. Dari 19 Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu Kota Solok sebesar 3,66 disebabkan adanya penambahan penduduk migrasi masuk ke Kota Solok yang berasal dari Provinsi Aceh, Provinsi Riau, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menyebabkan jumlah penduduk disetiap Kabupaten/Kota sangatlah bervariasi dengan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 138,19 jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu 5.866,21 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah yang hanya 24,173 kilometer persegi dan merupakan wilayah dengan luas terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari keberadaan dan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Bukittinggi.

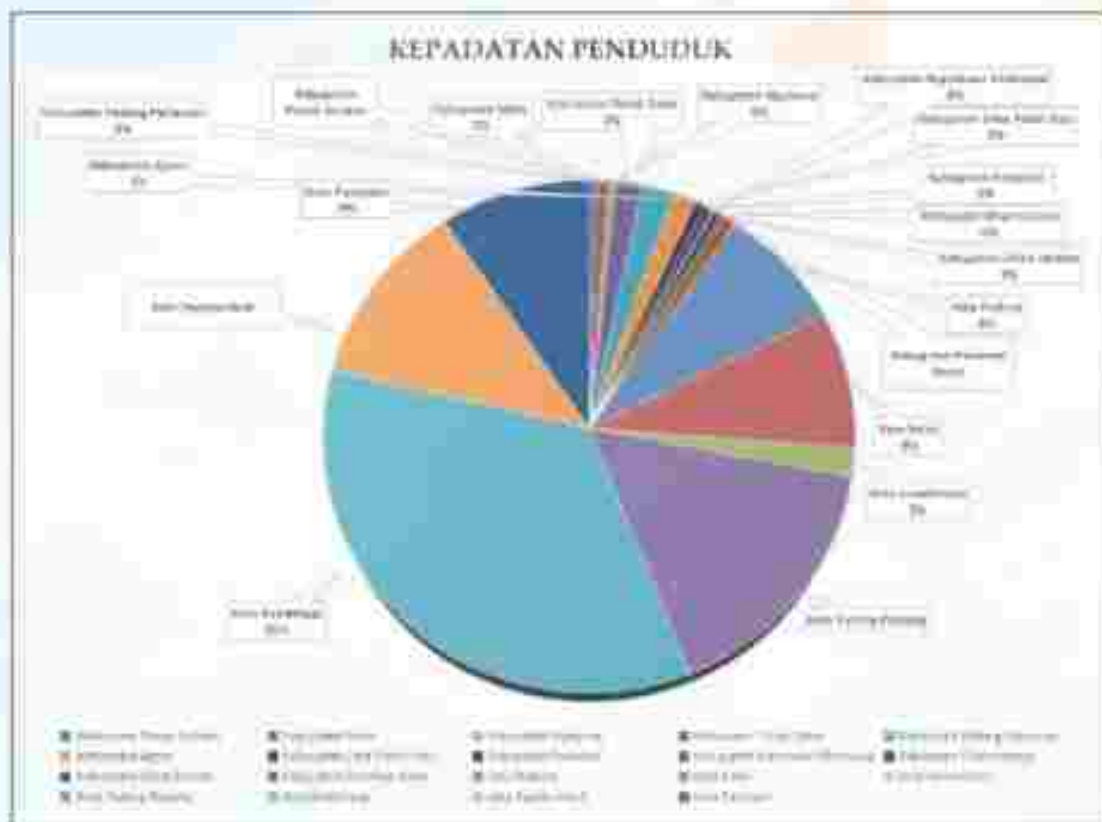
Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya 16,35 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah terbesar yaitu 5.983,222 kilometer persegi. Ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang bentuk wilayah geografisnya adalah kepulauan, dimana terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas suku Mentawai dan 95 (sembilan puluh lima) pulau-pulau kecil lainnya yang menyebar disekeliling Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa dan jarak rumah penduduk yang jauh antara satu dengan yang lainnya.

Gambaran jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kabupaten Pasisir Selatan	533.796	6.043,649	88,29
2	Kabupaten Solok	413.025	3.590,404	115,05
3	Kabupaten Solokpanjang	267.323	3.150,580	79,50
4	Kabupaten Tanah Datar	362.674	1.377,186	277,67
5	Kabupaten Padang Pariaman	458.330	1.343,266	341,44
6	Kabupaten Agam	533.254	2.226,270	239,55
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	402.798	3.273,405	123,05
8	Kabupaten Pasaman	313.837	3.902,444	80,42
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	57.837	3.983,222	16,30
10	Kabupaten Dharmasraya	262.192	2.920,929	90,10
11	Kabupaten Solok Selatan	181.325	3.262,144	55,58
12	Kabupaten Pasaman Barat	454.050	3.852,993	117,84
13	Kota Padang	946.992	694,337	1.363,67
14	Kota Solok	85.553	56,720	1.490,87
15	Kota Sawahlunto	68.554	231,945	295,56
16	Kota Padang Panjang	43.865	23,560	1.862,05
17	Kota Bukittinggi	141.864	24,173	5.866,23
18	Kota Payakumbuh	149.077	74,532	1.999,64
19	Kota Pamanangan	310.625	44,767	1.800,23
	SUMATERA BARAT	5.420.399	62.116.642	87,19

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2024 (dalam)



Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Sedangkan berdasarkan agama, penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 5.678.121 jiwa atau 97,56 persen dan pemeluk agama lainnya adalah Kristen sebanyak 89.637 jiwa atau 1,54 persen, Katholik sebanyak 48.995 jiwa atau 0,84 persen Hindu sebanyak 85 jiwa atau 0 persen, Buddha sebanyak 3.231 jiwa atau 0,06 persen, Konghucu sebanyak 7 jiwa atau 0 persen, dan Kepercayaan sebanyak 283 jiwa atau 0 persen.

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,04% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 4,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja pertanian yang menurun terutama padi hingga penurunan kinerja transportasi udara seiring dengan mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang melambat.

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh Lapangan Usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menahan kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sehingga melambat pada tahun 2024. Namun demikian, merungkatnya konsumsi masyarakat di tengah kunjungan wisatawan yang terakselerasi menopang pertumbuhan ekonomi tetap positif.

2. Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV 2023. Realisasi pendapatan daerah tercatat senilai Rp. 6,47 triliun atau sebesar 94,39% dari target, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh naiknya realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Sementara itu, realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat mencatatkan peningkatan menjadi Rp. 6,51 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

3. Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Penurunan harga komoditas pangan terutama komoditas cabai merah yang didukung pasokan dari Jawa serta kembali lancarnya distribusi pangan pasca perbaikan akses jalan utama menjadi faktor stabilnya inflasi. Lebih lanjut, inflasi yang terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

4. Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan

Pembiayaan/kredit di Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 melambat sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit Sumatera Barat tercatat senilai Rp78 triliun dengan laju pertumbuhan 8,30% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi senilai Rp 78,13 triliun dengan laju pertumbuhan 5,08% (yoy) pada triwulan IV 2024. Dari sisi risiko, kualitas kredit Sumatera Barat pada triwulan laporan tetap baik dengan risiko terjaga, tecermiri dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang berada di bawah ambang batas 5%, yaitu sebesar 1,91%.

5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pertumbuhan transaksi pembayaran digital melalui QRIS semakin meningkat. Jumlah merchant maupun pengguna QRIS Sumatera Barat tumbuh masing-masing sebesar 15,99% (yoy) dan 19,68% (yoy). Peningkatan jumlah merchant dan jumlah pengguna QRIS merupakan hasil positif dari sinergi pelaksanaan berbagai program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, Pemerintah, dan industri untuk mendukung penggunaan QRIS dalam bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman dan handal bagi masyarakat.

Dari sisi pengelolaan uang rupiah, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengalami net-outflow. Inflow dari KPwBI Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV-2024 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara outflow mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tecermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2024, TPAK Sumatera Barat tercatat sebesar 70,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 69,61%. Sementara TPT periode Agustus 2024 sebesar 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga.

7. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) - 4,8% (yoy), didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian, dan peningkatan event pariwisata. Operasional JTTS seksi Padang-Sicincin diperkirakan menjadi daya tarik ekonomi sehingga mendorong kunjungan wisatawan. Tren kenaikan harga komoditas global serta peremajaan lahan juga memperkuat ekspor dan kinerja industri pengolahan. Namun, ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi cuaca tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024. Namun demikian, inflasi diperkirakan tetap terjaga berada pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Peningkatan inflasi

diprakirakan berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi berlanjut dapat mempengaruhi harga acuan global dan nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada peningkatan harga komoditas impor. Untuk itu, TPID Sumatera Barat berkomitmen melanjutkan berbagai upaya pengendalian inflasi sehingga inflasi terjaga rendah dan stabil pada tahun 2025.

D. POTENSI DAERAH

Sumatera Barat, salah satu provinsi di Indonesia di wilayah Pulau Sumatera, dilengkapi dengan keanekaragaman hayati. Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan juga barisan pegunungan, maka mengakibatkan daerah Sumatera Barat dikelilingi oleh hutan hujan tropis, dengan kondisi curah hujan dan kelembaban yang mendukung bagi berbagai jenis tanaman tropis. Oleh karena itu, hampir 70 persen wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan hutan konservasi (32 persen) dan hutan lindung (35 persen). Dukungan Geografi tersebut membuat sektor pertanian menjadi unggulan di Sumatera Barat dari sembilan jenis sektor usaha lainnya.

Tidak hanya hutan, Sumatera Barat juga terkenal dengan bentangan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan terbentang dari utara Pulau Sumatera yaitu Nangroe Aceh Darusalam sampai ujung selatan yaitu Lampung, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci yang terbentang di Jambi. Rangkaian Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian pergunungan pertemuan dari pelat tektonik Euroasia dan Australia. Pelat Tektonik tersebut mengandung banyak mineral dan bebatuan. Kondisi geografis alam tersebut memberikan implikasi adanya keanekaragaman batuan yang mungkin mendukung kapasitas produksi daerah. Terkhusus di Sumatera Barat, yang terkenal adalah Pasaman Area, masih dalam eksplorasi diperkirakan memiliki potensi tambang emas.

Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan.

Sumatera Barat memiliki potensi bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A, yaitu batu bara terdapat di Kota Sawahlunto. Sedangkan bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten dan kota, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil.

Bahan galian juga banyak terdapat di daerah ini. Salah satu yang telah banyak memberi manfaat bagi daerah ini adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri semen. PT Semen Padang telah memanfaatkan kekayaan alam ini selama puluhan tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar Danau Singkarak, dan Padang Panjang. Di Padang Panjang, deposit batu kapur yang dapat dieksploitasi mencapai 43 juta ton. Bahan galian lainnya adalah batubara di Sawahlunto serta obsidian dan batu andesit di Padang Pariaman. Sumber air yang melimpah juga telah banyak memberi manfaat bagi pembangunan daerah ini. Perairan Danau Singkarak dan Maninjau telah lama dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sumber air ini juga memiliki potensi besar untuk diolah dan dikemas menjadi air mineral.

Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Di daerah perbukitan dan pegunungan terdapat perkebunan karet, cengkih, dan lada. Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan menghasilkan kayu.

Medan yang berat karena banyaknya lereng perbukitan yang curam merupakan tantangan utama pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini.

Keindahan alam dan budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat sudah terkenal dan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Umumnya tiap Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai obyek pariwisata minimal satu kategori yang potensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata alam dan budaya.

Kategori dari obyek pariwisata ini dapat berupa obyek pemandangan alam dari pantai seperti Teluk Bayur, wilayah pegunungan yang sangat mempesona, danau, ngarai dan lembah atau obyek kebudayaan.

Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival dan even internasional, menjadi pendorong datangnya wisatawan ke provinsi ini. Beberapa kegiatan internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat adalah "the 2nd International Minangkabau Literacy Festival" yang berlangsung di Padang, Padang Panjang, dan Batusangkar, Event "Desa Wisata Fair 2024" yang diadakan di Desa Wisata Kubu Gadang, Event "Theme Song-Visit Beautiful West Sumatera" yang dirilis pada perayaan Hari Pariwisata Dunia dan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu pariwisata Sumatera Barat juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Tabuik, Festival Rendang, permainan kiu, dan seni bertenun. Di samping wisata alam dan budaya, Sumatera Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya.

Sumatera Barat memiliki akomodasi wisata, seperti hotel dan agen perjalanan yang cukup baik. Sedangkan untuk agen perjalanan di bawah

keanggotaan ASITA, Sumatera Barat sudah memiliki lebih dari 100 agen. Untuk melengkapi fasilitas penunjang pariwisata, pemerintah juga menyediakan kereta api wisata yang beroperasi pada waktu tertentu.

Untuk berbagai informasi serta literatur sejarah dan kebudayaan Minangkabau, wisatawan dapat memperolehnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak di Perkampungan Minangkabau, Padang Panjang. PDIKM terdapat berbagai dokumentasi berupa foto mikrograf, surat kabar, pakaian tradisional, kaset rekaman lagu daerah, dokumentasi surat-surat pemerintahan, dan alur sejarah masyarakat Minangkabau sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-an.

Tujuan wisata budaya di Sumatera Barat mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan, dimana kekayaan budaya Minangkabau seperti rumah gadang maupun kebudayaan suku Mentawai termasuk salah satu yang unik di nusantara dan dapat menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Di sektor pariwisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di Sumatera Barat telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Mentawai Mentawai-Siberut dan Sekitarnya dan DPN Padang-Bukittinggi dan Sekitarnya. Dari 2 DPN tersebut telah ditetapkan 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu:

1. KPPN Siberut dan sekitarnya.
2. KPPN Sipora dan sekitarnya.
3. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya.
4. KPPN Padang dan sekitarnya.

5. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya,
6. KPPN Singkarak dan sekitarnya.
7. KPPN Batusangkar dan sekitarnya.
8. KPPN Maninjau dan sekitarnya.
9. KPPN Sawahlunto dan sekitarnya.
10. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya.

Dengan telah ditetapkan secara normatif potensi yang dimiliki Sumatera Barat di bidang kepariwisataan oleh Pemerintah Pusat, maka kedepan arah pengembangan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah akan semakin jelas. Kekhasan wilayah geografi dan bentuk topografi, mulai dari daerah pesisir pantai, pulau-pulau, sampai dengan daerah dataran tinggi, pegunungan, danau dan sungai menjadi potensi pengembangan pariwisata Sumatera Barat.

Keunikan wilayah Sumatera Barat didukung pula oleh iklim tropis sebagai daerah perlintasan garis khatulistiwa. Keindahan alami hutan tropis dan keelokan pemandangan jajaran perbukitan, sawah dan ladang di sepanjang jalan yang menghubungkan antar daerah dan wilayah Sumatera Barat telah didukung dengan sarana prasarana jalan dan transportasi yang memadai, menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata.

Penduduk Sumatera Barat yang ramah, religius dan terbuka menganut nilai-nilai matriakat yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia yang menganut sistem patriakat. Keunikan lokal seperti ini dan hal lainnya yang terkait budaya, keserian, kearifan lokal, kuliner dan peran sejarah dalam kemerdekaan RI telah memperkaya potensi wisata Sumatera Barat. Dengan beragamnya objek dan tujuan wisata yang dapat dikunjungi serta dinikmati di Sumatera Barat, maka pariwisata berpotensi sebagai lokomotif dalam percepatan pembangunan daerah.

Sejak bulan April 2020, untuk mengurangi penyebaran COVID-19, BIM ditutup sementara untuk penerbangan internasional, sehingga sampai September 2022 tidak ada wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumatera Barat melalui BIM. Namun, mulai Oktober 2022 terdapat penerbangan untuk rute internasional di BIM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat (Sumbar) melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Oktober 2024 adalah sebanyak 7.511 kunjungan.

Tingkat hunian kamar (occupancy rate) hotel di Sumatera Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada bulan September 2024 tingkat hunian kamar hotel berbintang mencapai 48,34%, meningkat dari 44,07% di bulan sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai event nasional yang digelar di akhir tahun.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) Asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumatera Barat pada Desember 2024 adalah selama 1,24 hari.

Bandara Internasional Minangkabau sepanjang Tahun 2024 sudah melayani 2,5 Juta Penumpang dengan kenaikan sebesar 4,22%. Kenaikan jumlah penumpang tidak terlepas dari pulihnya sektor pariwisata Sumatera Barat dan menjadi salah destinasi favorit Wisatawan Mancanegara Tahun 2024.

BAB III

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. SUMBER DATA

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota.

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk posisi per 31 Desember 2024 dan data yang berasal dari OPD dan Instansi teknis (lintas sektor) terkait yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN

1. Kuantitas Penduduk

Komposisi dan Persebaran Penduduk

Bagian ini menjelaskan mengenai komposisi dan persebaran (distribusi) penduduk dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik.

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi, dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya.

Pengelompokan ini sangat berguna untuk :

- › Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya.
- › Mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.
- › Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan.
- › Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya.
- › Mengetahui “proses demografi” yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

Komposisi penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dapat diklasifikasikan menurut :

- › Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak.
- › Karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan.
- › Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan.

- › Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, kecamatan, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- › Persebaran penduduk secara geografis.
- › Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7-12 tahun; SLTP = 13-15 tahun; SLTA = 16-18 tahun; dan Perguruan Tinggi = 19-24 tahun).

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

- › Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun.

- Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-64 tahun,
- Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 65 tahun keatas (mengikuti ketentuan WHO).

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih.

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Kelompok penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sandang dan lain sebagainya. Sementara kelompok penduduk tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan sosial lainnya dan lain sebagainya.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur median (*median age*)
- Rasio jenis kelamin (*sex ratio*)
- Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)

1) Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan

migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*immigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Namun, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah
dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin					
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	Kabupaten Pasiajahan	207.907	8,75	236.279	9,75	444.186	9,12
2.	Kabupaten Solok	207.386	7,76	259.866	7,71	467.252	7,73
3.	Kabupaten Sawang	124.672	6,27	122.633	6,25	247.305	6,25
4.	Kabupaten Tapanuli Daya	191.323	1,59	287.141	2,40	478.464	6,57
5.	Kabupaten Padang Pariaman	231.613	7,39	257.685	7,36	489.298	7,37
6.	Kabupaten Agam	267.404	6,25	265.894	6,27	533.298	6,26
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	210.966	1,86	215.388	1,90	426.354	1,88
8.	Kabupaten Pesisir	107.474	1,29	106.441	1,28	213.915	1,29
9.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	30.323	1,29	47.249	1,40	77.572	1,40
10.	Kabupaten Dharmasraya	122.963	6,21	119.210	6,11	242.173	6,16
11.	Kabupaten Solok Selatan	62.071	3,17	69.691	3,08	131.762	3,12
12.	Kabupaten Takengin Barat	221.752	7,40	229.361	7,29	451.113	7,34
13.	Kota Padang	672.379	14,77	474.323	10,20	1.146.702	14,27
14.	Kota Solok	62.962	1,47	62.371	1,47	125.333	1,47
15.	Kota Sawahlangu	36.500	1,29	54.274	1,79	90.774	1,29
16.	Kota Padang Panjang	62.344	1,29	37.799	1,09	100.143	1,21
17.	Kota Bukittinggi	73.294	2,01	50.666	2,44	123.960	2,46
18.	Kota Payakumbuh	26.807	1,17	71.864	2,14	98.671	2,19
19.	Kota Parapat	43.514	1,06	58.351	1,27	101.865	1,19
Sumatera Barat		2.603.532	10,98	2.497.227	10,96	5.100.759	10,97

Sumber: Data BPS/KBRI BPS/KBRI Sumbar & Tabung, 2024

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dan gambaran ini terlihat pada hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya Kabupaten Lima Puluh Kota serta Kota Padang yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang

yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2024 sebagian besar merupakan penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun, namun komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 10-14 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun sedangkan penduduk perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun. Dari kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50 persen) yaitu sebesar 67,06 persen merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 24,62 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 8,32 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
0-4	256.708	7,14	192.652	5,60	449.360	6,87
05-09	260.077	8,91	241.696	8,34	501.773	8,63
10-14	274.540	9,29	254.794	8,78	529.334	9,09
15-19	252.804	8,67	242.452	8,27	495.256	8,50
20-24	244.972	8,12	235.159	8,01	480.131	8,57
25-29	242.801	8,31	223.530	7,71	466.331	8,01
30-34	202.376	6,93	191.126	6,60	393.502	6,76
35-39	200.084	6,90	183.418	6,24	383.502	6,67
40-44	208.428	7,17	202.075	6,97	410.503	7,25
45-49	189.009	6,63	186.052	6,62	375.061	6,63
50-54	160.334	5,69	164.299	5,67	324.633	5,58
55-59	135.863	4,81	146.001	5,08	281.864	4,81
60-64	112.114	3,94	127.699	4,41	239.813	4,12
65-69	91.173	3,12	108.213	3,74	199.386	3,43
70-74	62.891	2,14	73.894	2,50	136.785	2,38
> 75	36.007	1,22	62.192	2,18	98.199	1,71
Jumlah	2.973.332	100,00	2.897.232	100,00	5.870.564	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2024 (jumlah)

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu seperempat penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.432.952 jiwa (24,62 persen). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi *entry* tenaga kerja baru, yang memerlukan *skill* dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif, baik di rumah maupun di masyarakat sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu bersaing memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi lain diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu pula

menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 401.340 jiwa (6,90 persen) penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2024 merupakan balita. Kondisi ini juga menuntut perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

a) Umur Median (*Median Age*)

Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk *intermediate*, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (Da)	% Kumulatif
0-4	801.340	801.340	4,91
5-9	902.273	1.703.613	10,58
10-14	529.089	2.232.702	14,02
15-19	494.876	2.727.578	16,12
20-24	521.892	3.249.470	19,97
25-29	466.421	3.715.891	22,10
30-34	363.662	4.079.553	24,87
35-39	366.000	4.445.553	26,67
40-44	410.500	4.856.053	29,72
45-49	370.076	5.226.129	31,33
50-54	324.633	5.550.762	32,73
55-59	241.366	5.792.128	34,26
60-64	259.913	6.052.041	35,88
65-69	190.089	6.242.130	37,11
70-74	136.798	6.378.928	38,25
> 75	140.229	6.519.157	39,18
Jumlah All	5.493.349		

Sumber: Data Kemendagri BPS (DKS Sumatera II 2024) (2024).

Berdasarkan Tabel 5, dapat dihitung umur median (*median age*) di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Umur Median (Md)} &= I_{\text{Md}} + \frac{\frac{N}{2} - f_s}{f_{\text{Md}}} \times 1 \\ \text{Umur Median (Md)} &= 25 + \frac{2910180 - 2449649}{466.421} \times 5 \\ \text{Umur Median (Md)} &= 25 + 4,937 \\ \text{Umur Median (Md)} &= 29,94 \text{ tahun} \end{aligned}$$

Keterangan :

- I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$
- N = Jumlah penduduk total
- f_s = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

- f_{mi} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$
- i = Kelas interval umur

Dengan demikian, umur median penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah 29,94 tahun, yang berarti setengah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 berusia dibawah 29,94 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29,94 tahun. Umur median ini terletak diantara 20-30 tahun. Dengan kata lain, penduduk Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

b) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (RJK), biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- › Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- › Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- › Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki

dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Juni)		Total (Juni)	Rasio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kabupaten Pasia Sibolang	207.907	246.279	454.186	103,98
2	Kabupaten Solok	207.540	207.695	415.235	100,02
3	Kabupaten Gunung	124.472	122.401	246.873	101,63
4	Kabupaten Tanah Datar	191.313	191.101	382.414	100,10
5	Kabupaten Padang Pariaman	126.415	127.445	253.860	101,28
6	Kabupaten Agam	107.400	103.908	211.308	103,32
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	200.980	201.408	402.388	99,84
8	Kabupaten Pasaman	117.478	116.501	233.979	100,87
9	Kabupaten Xepi, Mentawai	50.932	47.005	97.937	108,34
10	Kabupaten Dharmasraya	122.982	121.218	244.200	101,76
11	Kabupaten Solok Selatan	92.671	91.852	184.523	102,01
12	Kabupaten Pasaman Barat	218.333	225.505	443.838	103,20
13	Kota Padang	472.470	454.512	926.982	99,60
14	Kota Solok	42.982	42.571	85.553	100,97
15	Kota Sawahlangu	54.930	54.779	109.709	101,24
16	Kota Padang Panjang	52.159	51.708	103.867	102,52
17	Kota Bukittinggi	71.236	70.668	141.904	100,60
18	Kota Padangsidik	25.007	24.981	50.008	100,21
19	Kota Pariaman	62.704	61.511	124.215	102,24
Sumatera Barat		3.425.532	3.407.227	6.832.759	100,90

Sumber: Data BPS/SDH/SPRO/Sumbar II/2024 (2024)

Tabel 7.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan		
00-04	208.708	192.632	401.340	108,35
05-09	260.577	241.696	502.273	107,81
10-14	274.545	254.794	529.339	107,75
15-19	252.404	242.452	494.856	104,10
20-24	266.672	255.169	521.841	104,51
25-29	242.901	225.520	468.421	108,67
30-34	202.576	191.106	393.682	106,00
35-39	200.584	195.416	396.000	102,64
40-44	208.428	202.075	410.503	103,14
45-49	188.019	186.057	374.076	101,05
50-54	160.334	164.299	324.633	97,59
55-59	135.363	146.001	281.366	92,72
60-64	112.114	127.699	239.813	87,80
65-69	91.174	108.213	199.387	84,25
70-74	62.694	73.904	136.598	84,83
> 75	56.037	92.192	148.229	60,78
Jumlah	2.923.111	2.897.227	5.820.339	100,89

Sumber : Data Kesehiduan Rumah (DKD) Semester II 2024 (Juli-Des)

Dari kedua tabel tersebut nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah 100,89 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100-101 orang penduduk laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108,35 yang artinya terdapat 108-109 balita

berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun juga menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

c) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki serta bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya

ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Menurut bentuknya, piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dinamakan "Piramida penduduk dengan bentuk "kendi". Piramida bentuk ini biasa terdapat pada daerah/negara yang mengalami penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun.

Sedangkan berdasarkan cirinya, Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dinamakan Konstriktif (*Constrictive*), dimana bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.

Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita dapat mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Berdasarkan Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Sumatera Barat saat ini didominasi oleh penduduk usia muda, terutama penduduk pada usia 10-14 tahun, sehingga penyediaan pelayanan pendidikan agar dapat lebih ditingkatkan. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Sumatera Barat sedang mengarah pada struktur penduduk usia produktif sehingga perlu disiapkan ketersediaan atas tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada piramida ini juga terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 00-04 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun. Demikian juga dengan jumlah penduduk 05-09

tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 8,32 persen kondisi per 31 Desember 2024. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

d) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah

penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 RK_{\text{muda}} &= \frac{P_{0-14 \text{ tahun}}}{P_{15-64 \text{ tahun}}} \times 100 \\
 RK_{\text{tua}} &= \frac{P_{>65 \text{ tahun}}}{P_{15-64 \text{ tahun}}} \times 100 \\
 Rk_{\text{total}} &= \frac{P_{0-14 \text{ tahun}} + P_{>65 \text{ tahun}}}{P_{15-64 \text{ tahun}}} \times 100
 \end{aligned}$$

RK_{total} = Rasio ketergantungan penduduk usia muda dan tua

RK_{muda} = Rasio ketergantungan penduduk usia muda

RK_{tua} = Rasio ketergantungan penduduk usia tua

$P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

$P_{(>65)}$ = Jumlah penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 8, di bawah ini :

Tabel 8.
Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (jns)		Total (jns)	% Total
	Laki-Laki	Perempuan		
0-14 tahun (Umur Muda)	743.800	689.122	1.432.952	36,71
15-64 tahun (Umur Produktif)	1.969.397	1.933.794	3.903.191	49,12
> 65 tahun (Umur Tua)	209.905	274.311	484.216	12,41
Jumlah	2.923.102	2.897.227	5.820.359	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2024 (dijilahi)

Berdasarkan data tersebut maka rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

$$RK_{\text{muda}} = \frac{1.432.952}{3.903.191} \times 100 = 36,71$$

$$RK_{\text{tua}} = \frac{484.216}{3.903.191} \times 100 = 12,41$$

$$RK_{\text{total}} = \frac{(1.432.952 + 484.216)}{3.903.191} \times 100 = 49,12$$

Dari perhitungan diatas bahwa rasio ketergantungan total Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar 49,12 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 49,12 persen ini terdiri dari rasio penduduk muda sebesar 36,71 persen dan rasio penduduk tua sebesar 12,41 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

3) **Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)**

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, kurang padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, cukup padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tergolong provinsi yang kurang padat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini yang memperlihatkan rasio kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Dengan luas 42.119.542 kilometer persegi, Provinsi Sumatera Barat didiami oleh penduduk sebesar 5.820.359 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 138,19 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Dengan kata lain rata-rata

setiap kilometer persegi Provinsi Sumatera Barat didiami sebanyak 138 jiwa.

Tabel 9
Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Juta)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Kabupaten Pasia Selatan	553.794	6.045.649	48,29
2	Kabupaten Solok	413.075	3.390.404	115,05
3	Kabupaten Singingi	247.323	3.170.980	78,30
4	Kabupaten Tanah Datar	385.674	1.377.186	277,87
5	Kabupaten Padang Pariaman	458.710	1.342.266	241,44
6	Kabupaten Agam	337.254	2.226.270	239,33
7	Kabupaten Limas Puluh Kota	402.783	3.273.405	123,05
8	Kabupaten Pasaman	317.937	3.902.444	80,42
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	97.837	5.983.222	16,35
10	Kabupaten Dharmasraya	241.182	2.920.925	82,93
11	Kabupaten Solok Selatan	181.515	3.187.144	55,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	454.053	3.852.993	117,84
13	Kota Padang	946.982	694.337	1.363,87
14	Kota Solok	85.553	58.720	1.456,97
15	Kota Sawahlunto	68.339	231.945	293,36
16	Kota Padang Panjang	63.945	23.560	2.712,01
17	Kota Bukittinggi	141.804	24.173	5.868,21
18	Kota Paralembah	149.077	74.552	1.999,64
19	Kota Pamanangan	103.835	64.787	1.603,21
	Sumatera Barat	3.820.339	12.119.542	138,19

Sumber : Data Komutasi BPS (2023) Semester II 2024 (14/01/24)

Dari Tabel 9 juga terlihat bahwa rasio kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah hanya 24,173 kilometer persegi didiami oleh penduduk sebanyak 141.804 jiwa dan rasio kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah 5.983,222 kilometer persegi didiami oleh penduduk hanya sebanyak 97.837 jiwa.

4) Angka Pertumbuhan Penduduk

Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disajikan pada Tabel 10; dimana dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2023 ke tahun 2024 termasuk rendah, karena hanya bertambah sebesar 1,21 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP elektronik. Pertumbuhan Penduduk yang rendah ini sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Angka pertumbuhan penduduk di atas dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor alami yaitu kelahiran dan kematian penduduk dan faktor non alami, yaitu perpindahan penduduk (migrasi) baik migrasi masuk (datang) maupun migrasi keluar (pindah).

Tabel 10.
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Juta)		Pertumbuhan Penduduk (%)
		2023	2024	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	528.261	533.796	1,01
2	Kabupaten Solok	406.434	423.075	1,13
3	Kabupaten Sijunjung	344.342	347.323	1,21
4	Kabupaten Tanah Datar	280.721	282.474	0,51
5	Kabupaten Padang Pariaman	455.214	458.312	0,68
6	Kabupaten Agam	530.123	535.254	0,59
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	307.643	312.710	1,28
8	Kabupaten Pasaman	309.202	313.457	1,41
9	Kabupaten Kep. Mentawai	95.168	97.407	2,37
10	Kabupaten Dharmasraya	257.728	262.181	1,69
11	Kabupaten Solok Selatan	182.373	183.323	0,58
12	Kabupaten Pasaman Barat	443.439	454.153	1,92
13	Kota Padang	834.847	846.982	1,25
14	Kota Solok	82.479	86.333	3,66
15	Kota Sawahlunto	68.390	69.319	0,26
16	Kota Padang Panjang	62.731	63.893	1,84
17	Kota Bukittinggi	138.514	141.904	2,33
18	Kota Payakumbuh	146.772	149.077	1,56
19	Kota Pariaman	101.800	103.833	2,10
Sumatera Barat		5.716.328	5.820.259	1,21

Sumber : Data Kemendagri BPS (DKB) Semester II 2023 dan Semester II 2024 (Juli)

Dari Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat yang tertinggi yaitu Kota Solok sebesar 3,66 persen, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,87, Kota Bukittinggi sebesar 2,33 persen, Kota Pariaman sebesar 2,10 persen, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,92 persen. Pertumbuhan penduduk yang terendah ada di 2 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,51, Kabupaten Solok Selatan sebesar 0,58 persen, dan Kota Sawahlunto sebesar 0,26 persen.

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentunya hasilnya akan berbeda dengan definisi di atas. Namun demikian, dalam struktur database, ketepatan pelaporan atau kejujuran masyarakat juga sangat menentukan dalam pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan ini. Oleh sebab itu sangat diharapkan sekali

masyarakat agar melaporkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 11, dimana terlihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2024 sebesar 22,05 persen berpendidikan SLTA/ sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. Sementara itu, persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/Strata I dan Strata II lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hanya untuk tingkat pendidikan Strata III, jumlah penduduk laki-laki yang

menamatkannya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 11.
Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (Jumlah)				Total (Jumlah)	
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Tidak/Belajar Sekolah	619.922	22,34	611.439	21,19	1.231.361	21,89
Sekolah Dasar (SD) Negeri/Kelompok	471.225	16,22	427.019	14,74	898.244	15,43
Lama SD (Sekolah)	312.191	10,98	303.229	10,79	615.420	10,74
SLTP/Sekolah	426.120	14,90	397.756	13,75	823.876	14,56
SLTA/Sekolah	438.486	15,37	424.762	14,72	863.248	15,09
Diploma I/II	4.734	0,16	21.532	0,76	26.266	0,46
Akademik (Diploma III)/Sarjana	51.222	1,77	47.284	1,64	98.506	1,73
Diploma IV/ (Sarjana)	136.411	4,84	217.287	7,51	353.698	6,09
Sarjana I	11.474	0,41	22.729	0,80	34.203	0,60
Sarjana II	1.432	0,05	679	0,02	2.111	0,04
Jumlah	2.921.170	100,00	2.897.220	100,00	5.818.390	100,00

Sumber : Data Kemendagri BPS (DKB) Sumatera © 2024 (pilot)

Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan tentunya keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan kondisi di atas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dimana warga negara asing pun bisa mencari

pekerjaan ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama ini diperlukan untuk merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat pada umumnya memeluk agama Islam sebanyak 5.678.121 orang (97,56 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen 89.637 orang (1,54 persen), Katholik 48.995 orang (0,84 persen). Sedangkan penganut agama Hindu hanya 85 orang (0 persen), Buddha 3.231 orang (0,06 persen), Konghucu hanya 7 orang (0 persen), dan Kepercayaan sebanyak 283 orang (0 persen).

Jika dikaitkan dengan wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada Tabel 13, maka agama Islam mendominasi di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hanya

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi oleh agama Kristen dan Katholik.

Agama kedua terbesar setelah Islam yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota adalah agama Kristen. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang merupakan wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar yaitu 46.804 jiwa penganut Kristen di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 14.476 jiwa di Kota Padang. Penganut Katholik sebanyak 28.324 jiwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 12.092 jiwa di Kota Padang. Selain itu, Kota Padang juga merupakan wilayah dengan penganut agama Hindu dan Buddha terbesar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Distribusi penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 12.
Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Islam	2.640.832	97,49	2.626.249	97,62	5.267.081	97,56
Kristen	46.502	1,59	43.133	1,49	89.635	1,54
Katholik	24.903	0,89	24.032	0,85	48.935	0,84
Hindu	45	0,00	40	0,00	85	0,00
Buddha	1.629	0,06	1.796	0,06	3.425	0,06
Konghucu	4	0,00	3	0,00	7	0,00
Kepercayaan	151	0,01	132	0,00	283	0,00
Jumlah	2.725.130	100,00	2.697.222	100,00	5.422.352	100

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (DPS Sumatera Barat 2024) (dalam %)

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2024

Tabel 13. Distribusi Penduduk menurut Agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024.

No	Kabupaten/Kota	Agama																	
		Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Buddha		Sikh		Kepercayaan		Tidak beragama			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Kabupaten Padang Sidharta	552.042	8,36	1.000	0,01	189	0,00	425	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Kabupaten Pasiajahan	412.732	7,27	303	0,00	18	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Kabupaten Solok	318.081	6,31	953	0,00	300	0,01	7	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Kabupaten Tanah Datar	982.309	1,79	138	0,00	139	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Kabupaten Padang Pariaman	458.254	8,65	1.581	0,00	316	0,00	1	0,00	4	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Kabupaten Agam	539.005	9,92	3.755	0,00	507	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Kabupaten Kota Padang	400.850	7,60	403	0,00	58	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Kabupaten Dharmasraya	502.440	9,50	1.212	0,00	165	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	22.333	0,40	46.804	8,27	23.354	4,16	119	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	194	0,35
10	Kabupaten Dharmasraya	220.732	4,17	4.478	0,08	219	0,00	1.447	0,03	4	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	16	0,00
11	Kabupaten Solok	190.047	3,67	1.296	0,02	179	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Kabupaten Tanah Datar	449.144	7,96	8.070	0,15	2.643	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	0,00
13	Kabupaten Padang Pariaman	917.445	17,54	11.475	0,21	13.982	2,45	41	0,00	2.962	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	117	0,00
14	Kota Bukittinggi	41.003	0,08	340	0,00	314	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Kota Sawahlau	36.161	0,67	207	0,00	309	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Kota Padang Panjang	80.120	1,51	341	0,00	644	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.258	0,27
17	Kota Sibolga	179.147	3,41	2.367	0,04	1.139	0,02	435	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Kota Padangsidharta	147.490	2,80	934	0,00	449	0,00	125	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	Kota Payakumbuh	101.326	1,90	700	0,01	314	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Seluruh Regeri		6.598.116	100,00	49.430	0,00	46.944	0,00	45.108	0,00	433	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	10.038	0,15

Sumber: Data Kemendagri Provinsi (2023) Desember 31 2024 (Husain)

3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis disabilitas (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang disabilitas dirinci menurut jenis kelamin. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel menurut Kabupaten/Kota.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis disabilitas dan jenis kelamin per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 14, sedangkan distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis disabilitas dan Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14.
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin (Jenis)				Total (Jenis)	
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Disabilitas Fisik	1.281	13,11	909	15,58	2.220	14,03
2	Disabilitas Netra/Buta	569	5,81	441	6,91	1.010	6,25
3	Disabilitas Rungu/Wicara	1.252	12,81	1.320	17,55	2.572	14,69
4	Disabilitas Mental/Jiwa	5.524	56,54	2.920	45,75	8.444	52,28
5	Disabilitas Fisik dan Mental	791	8,05	423	6,63	1.014	6,28
6	Disabilitas Lainnya	553	5,68	408	7,46	1.042	6,43
	Jumlah	9.770	100	6.382	100	16.152	100

Sumber: BPS Sumatera Barat (BPS) Sumatra 2024 (dibina)

Dari Tabel 14 di atas diketahui bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 16.152 jiwa dengan jenis disabilitas yang paling banyak dialami adalah disabilitas mental/ jiwa sebanyak 8.444 jiwa (52,28 persen) dengan persentase tertinggi pada laki-laki sebanyak 5.524 jiwa (56,54 persen).

Bila dilihat pada Tabel 15, dapat diketahui bahwa hampir semua jenis disabilitas, jumlah terbesarnya berada di Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan jumlah terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hal ini bukan disebabkan karena jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan memang lebih banyak dari Kabupaten/Kota lainnya, namun karena sudah timbulnya kesadaran masyarakat untuk memperbaharui datanya dengan mencantumkan data yang sebenarnya termasuk dengan disabilitas yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan. Hal ini juga disebabkan karena Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki UKL di setiap Kecamatan, sehingga bisa memberikan pelayanan langsung *door to door* kepada masyarakat.

Dengan adanya data jumlah penduduk berdasarkan disabilitas ini, khususnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar yang memiliki jumlah penduduk penyandang disabilitas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, menuntut perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memperhatikan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi penduduk penyandang disabilitas ini,

khususnya untuk pelayanan publik di berbagai sektor agar seluruh penduduk disabilitas ini mendapatkan prioritas pelayanan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar juga harus menyediakan Rumah Sakit khusus bagi penyandang disabilitas ini agar seluruh penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan yang optimal.

Data disabilitas yang ada didatabase Dukcapil hanya ada jika penduduk mengisi/memberikan data tentang disabilitas dalam biodatanya.

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2024

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut jenis Disabilitas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024.

No	Kabupaten/Kota	Jenis Disabilitas (Jenis)															Total (Jenis)	
		Disabilitas Total		Disabilitas Sosial		Disabilitas Fisik		Disabilitas Mental		Disabilitas Intelektual		Disabilitas Sensori		Disabilitas Lainnya		Total (Jenis)		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kabupaten Padang Sidharta	403	30,14	363	26,03	54	12,22	367	11,43	332	32,74	103	9,28	2.711	19,78			
2	Kabupaten Solok	74	3,26	66	3,06	8	3,75	918	5,21	50	3,42	20	1,92	603	3,31			
3	Kabupaten Sijunjung	82	3,03	65	3,45	17	6,11	370	6,25	27	2,66	59	5,60	926	5,71			
4	Kabupaten Tanah Datar	240	10,32	34	5,24	206	9,55	206	9,10	38	9,57	48	4,22	3.033	4,49			
5	Kabupaten Padang Pariaman	146	6,35	49	4,25	148	6,24	614	7,79	97	9,57	143	13,57	1.225	7,44			
6	Kabupaten Agul	124	4,48	69	4,63	124	4,44	373	7,47	41	3,14	29	2,75	1.073	4,44			
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	90	3,36	43	3,06	106	4,35	469	5,79	12	1,18	50	3,37	786	4,93			
8	Kabupaten Pasaman	101	4,49	69	6,53	141	5,94	346	4,03	47	4,84	21	2,02	745	4,63			
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	104	9,79	16	3,08	25	3,65	43	4,52	8	0,74	32	3,07	343	6,69			
10	Kabupaten Dharmasraya	176	9,54	36	5,74	193	9,14	270	3,79	29	7,40	129	12,04	920	3,76			
11	Kabupaten Solok Selatan	42	1,85	31	1,95	76	5,29	249	2,65	20	1,67	48	6,55	475	2,94			
12	Kabupaten Pesisir Selatan	69	3,04	34	5,35	79	3,33	346	1,99	20	2,56	47	4,33	443	2,74			
13	Kota Padang	171	7,25	100	9,90	345	14,97	1.336	13,83	26	2,50	129	13,34	2.179	13,49			
14	Kota Sibolga	33	1,24	23	2,30	42	1,27	384	2,30	11	1,06	11	1,06	316	1,29			
15	Kota Sarangani	49	2,16	33	3,00	65	3,59	344	1,99	33	3,22	59	5,64	399	2,47			
16	Kota Padang Panjang	40	1,52	8	0,79	48	1,49	229	3,23	7	0,69	11	1,06	314	1,33			
17	Kota Bukittinggi	91	3,97	38	2,77	34	1,52	391	4,18	14	1,38	21	2,02	441	2,98			
18	Kota Payakumbuh	28	1,19	11	1,09	63	2,15	303	4,53	7	0,69	3	0,48	442	2,95			
19	Kota Pariaman	76	2,97	29	2,97	37	2,40	226	2,19	26	2,34	47	4,01	453	2,79			
	Provinsi Barat	3.229	100,00	3.036	100,00	2.472	100,00	9.444	100,00	3.314	100,00	1.552	100,00	16.332	100,00			

Sumber: Data Potensial BPS (2024) Provinsi Sumatera Barat (11/2024) (p.44/46)

4) Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin ini meliputi belum kawin, kawin dan cerai hidup dan cerai mati.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut status kawin dan jenis kelamin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini :

Tabel 16.
Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Status Kawin	Jenis Kelamin (Jenis)				Total (Jenis)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Belum Kawin	1.523.847	53,31	1.266.846	43,72	2.820.810	48,96
Kawin	1.284.244	43,89	1.311.073	45,25	2.595.817	44,60
Cerai Hidup	38.217	1,31	68.455	2,37	106.972	1,84
Cerai Mati	46.224	1,54	250.853	8,66	297.077	5,10
Jumlah	2.922.532	100	2.897.227	100	5.820.368	100

Sumber: Data Konsolidasi Hasil (DKH) Sensus II 2024 (draf)

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2024

Tabel 17. Distribusi Pendidikan Menurut Status Kawin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024.

No	Kabupaten/Kota	Status Kawin (Orang)												Total (Orang)	
		Tidak Menikah		Kawin		Ceraah Hidup		Usai Muda		Jumlah		%			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	240.975	8,86	2.46.084	9,48	9.623	0,00	28.104	0,48	3.35.786	9,37	3.35.786	9,37		
2	Kabupaten Sijunjung	197.852	7,81	1.96.962	7,83	9.621	0,00	21.935	0,08	413.075	7,10	413.075	7,10		
3	Kabupaten Sembiring	116.792	4,14	1.15.739	4,46	3.784	0,01	11.106	0,04	247.333	4,23	247.333	4,23		
4	Kabupaten Tanah Datar	179.450	8,36	170.960	8,29	8.253	0,04	24.002	0,11	382.674	8,67	382.674	8,67		
5	Kabupaten Padang Pariaman	253.065	8,23	1.67.619	5,71	18.015	0,06	39.611	0,13	458.310	7,97	458.310	7,97		
6	Kabupaten Agul	263.908	8,56	236.241	8,72	11.732	0,04	31.385	0,10	543.266	9,38	543.266	9,38		
7	Kabupaten Limas Selatan Kota	181.295	8,30	1.99.883	9,21	7.034	0,03	23.525	0,10	412.735	9,32	412.735	9,32		
8	Kabupaten Pasaman	156.788	5,56	1.96.118	7,24	4.031	0,01	16.306	0,06	313.837	5,34	313.837	5,34		
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	50.892	1,80	43.090	1,66	621	0,00	3.144	0,01	97.857	1,48	97.857	1,48		
10	Kabupaten Dharmasraya	113.691	3,96	1.17.846	4,54	3.247	0,01	9.408	0,03	244.192	4,10	244.192	4,10		
11	Kabupaten Solok Selatan	87.522	3,10	63.266	2,31	2.911	0,01	7.826	0,03	161.525	2,72	161.525	2,72		
12	Kabupaten Pasohulu Barat	227.126	8,05	1.99.292	7,28	7.584	0,03	30.066	0,11	464.068	8,28	464.068	8,28		
13	Kota Padang	437.481	16,27	412.921	15,45	17.445	0,06	46.085	0,17	913.932	16,27	913.932	16,27		
14	Kota Solok	42.904	1,51	37.842	1,46	1.787	0,01	3.205	0,01	85.738	1,57	85.738	1,57		
15	Kota Sawahlunto	32.211	1,14	30.654	1,14	1.613	0,01	4.051	0,01	68.529	1,24	68.529	1,24		
16	Kota Padang Pariaman	33.291	1,15	27.183	1,04	1.666	0,01	2.782	0,01	63.922	1,16	63.922	1,16		
17	Kota Bukittinggi	21.929	0,79	61.066	2,33	2.660	0,01	5.932	0,02	111.603	2,01	111.603	2,01		
18	Kota Payakumbuh	73.011	2,59	66.516	2,52	3.609	0,01	6.922	0,03	149.058	2,76	149.058	2,76		
19	Kota Pariaman	53.361	1,89	42.492	1,64	2.167	0,01	5.291	0,02	103.311	1,89	103.311	1,89		
	Sumatera Barat	2.450.400	100,00	2.395.812	100,00	106.972	100,00	277.072	100,00	5.250.256	100,00	5.250.256	100,00		

Sumber: Data Kemendagri Provinsi Sumatera Barat (2024) (BPS)

Tabel 16 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin per 31 Desember 2024 berjumlah 2.820.493 jiwa (48,46 persen). Sementara itu, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan perempuan. Sedangkan, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai. Banyaknya proporsi belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Jika diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk berstatus kawin dengan persentase tertinggi ada pada Kota Padang dengan jumlah 427.971 jiwa (16,49 persen), diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 246.084 jiwa (9,48 persen), sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah ada pada Kota Padang Panjang dengan jumlah 27.105 jiwa (1,04 persen), diikuti Kota Sawahlunto dengan jumlah 30.654 jiwa (1,18 persen).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk cerai hidup dan cerai mati dengan persentase tertinggi juga ada pada Kota Padang, dengan jumlah masing-masing 17.445 jiwa (16,31 persen) untuk cerai hidup dan sebanyak 44.085 (14,84 persen) untuk cerai mati.

a) Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Angka perkawinan kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 18, berikut ini :

Tabel 18.
Angka Perkawinan Kasar
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Kasar
		Pada Perkiraan Tahun	Jumlah Terkena	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	531.064	3.555	6,69
2	Kabupaten Sikok	410.750	2.853	6,95
3	Kabupaten Sijunjung	245.935	1.516	6,17
4	Kabupaten Tanah Datar	981.701	2.570	6,74
5	Kabupaten Padang Panjang	456.734	3.465	7,59
6	Kabupaten Agam	501.665	3.408	6,86
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	400.236	2.604	6,51
8	Kabupaten Pasaman	311.520	2.047	6,59
9	Kabupaten Kep. Mentawai	96.453	117	1,21
10	Kabupaten Dharmasraya	234.950	1.428	6,09
11	Kabupaten Solok Selatan	182.009	1.165	6,39
12	Kabupaten Pasaman Barat	449.740	2.906	6,46
13	Kota Padang	940.915	3.372	5,71
14	Kota Solok	84.016	438	5,21
15	Kota Sawahlunto	98.473	632	6,42
16	Kota Padang Panjang	40.017	345	5,45
17	Kota Bukittinggi	140.169	687	4,90
18	Kota Payakumbuh	147.825	992	6,74
19	Kota Pariaman	102.758	700	6,81
	Sumatera Barat	5.795.344	50.435	6,31

Sumber: DKB 2024, DKB 2024 dan Kaural Komutasi Agama Provinsi Sumbar (2024)

Dari Tabel 18 dapat dilihat angka perkawinan kasar Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 6,31, artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dari 1.000 penduduk terdapat 6 - 7 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 6 - 7 kali terjadi peristiwa perkawinan.

b) Angka Perkawinan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan batas usia minimal pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan Wanita.

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 19 tahun ke atas sebagai faktor penyebab. Sementara untuk penduduk berusia di bawah 19 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebab karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Angka perkawinan umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 19 berikut ini :

Tabel 19.
Angka Perkawinan Umum
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perkawinan Umum		Angka Perkawinan Umum
		Umur 19 tahun keatas pada pendaftaran tahun	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pasaman Selatan	961.272	2.099	6,74
2	Kabupaten Solok	289.441	2.893	10,27
3	Kabupaten Minang	146.492	5.314	33,07
4	Kabupaten Tanah Datar	272.484	2.071	6,41
5	Kabupaten Pangkal Jember	933.984	2.440	6,10
6	Kabupaten Agam	619.239	2.484	6,44
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	282.409	2.074	6,27
8	Kabupaten Pesisir	200.499	2.987	10,96
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	43.118	117	1,06
10	Kabupaten Dharmasraya	161.661	1.009	6,76
11	Kabupaten Solok Selatan	133.070	4.343	30,41
12	Kabupaten Pasaman Barat	294.400	2.899	6,27
13	Kota Padang	668.211	2.272	6,23
14	Kota Bukik	93.911	499	1,09
15	Kota Sumbatran	47.420	491	6,09
16	Kota Padang Panjang	42.401	249	6,14
17	Kota Bukittinggi	62.064	447	1,79
18	Kota Dharmasraya	98.210	693	6,96
19	Kota Pesisir	44.406	794	10,00
Sumatera Barat		3.908.222	36.498	6,22

Sumber: BPS B 2023, BPS B 2024 dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (2024)

Dari Tabel 19 tersebut dapat dilihat angka perkawinan umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 9,22, artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dari 1.000 penduduk berusia 19 tahun ke atas terdapat 9-10 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 9-10 kali terjadi peristiwa perkawinan.

c) Angka Perceraian Kasar (*Divorce*)

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian, yang merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin.

Angka perceraian kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 20, yaitu sebesar 1,46, yang artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dari 1.000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 1-2 kali. Dari tabel juga terlihat bahwa angka perceraian terbesar berada di Kota Payakumbuh sebesar 3,66 dan yang terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,34.

Tabel 20.
Angka Perceraian Kasar
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Juta)		Angka Perceraian Kasar
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perceraian	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	331.084	457	1,28
2	Kabupaten Solok	410.230	279	0,68
3	Kabupaten Sijunjung	245.837	238	0,96
4	Kabupaten Tanah Datar	381.203	734	1,91
5	Kabupaten Padang Pariaman	456.764	251	0,54
6	Kabupaten Agam	331.663	1.015	3,03
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	400.274	440	1,10
8	Kabupaten Pasaman	311.520	302	0,97
9	Kabupaten Kep. Mentawai	96.455	33	0,34
10	Kabupaten Dharmasraya	210.034	390	1,83
11	Kabupaten Solok Selatan	182.049	413	2,27
12	Kabupaten Pasaman Barat	449.744	303	0,67
13	Kota Padang	840.915	1.150	1,37
14	Kota Solok	61.014	236	3,85
15	Kota Sawahlunto	68.471	128	1,87
16	Kota Padang Panjang	63.313	144	2,27
17	Kota Bukittinggi	140.168	211	1,51
18	Kota Payakumbuh	147.925	542	3,68
19	Kota Pariaman	102.754	171	1,66
Sumatera Barat		3.780.344	8.457	2,24

Sumber : DES II 2023, DES II 2024, dan Pengadilan Tinggi Agama Padang (2024)

d) Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar, karena menunjukkan penduduk berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 19 tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

Angka perceraian umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini :

Tabel 21:
Angka Perceraian Umum
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Peristiwa (Jumlah)		Angka Perceraian Umum
		Usia 19 tahun keatas pada pertengahan tahun	Jumlah Perceraian	
1	Kabupaten Pasia Selatan	365.072	3.331	9,24
2	Kabupaten Solok	290.461	2.853	10,17
3	Kabupaten Sijunjung	184.094	1.218	6,61
4	Kabupaten Tanah Datar	272.046	2.570	9,43
5	Kabupaten Padang Pariaman	313.883	3.465	11,04
6	Kabupaten Agam	308.434	2.494	8,09
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	262.639	2.608	9,93
8	Kabupaten Pasaman	207.439	2.067	9,96
9	Kabupaten Kep. Mentawai	40.018	217	0,52
10	Kabupaten Dharmasraya	147.680	1.418	9,59
11	Kabupaten Solok Selatan	121.080	1.162	9,61
12	Kabupaten Pasaman Barat	244.431	2.808	11,51
13	Kota Padang	604.215	5.372	8,91
14	Kota Bukik	38.013	438	1,15
15	Kota Sawahlunto	47.825	431	0,90
16	Kota Padang Panjang	42.923	343	0,80
17	Kota Bukittinggi	34.064	487	1,43
18	Kota Payakumbuh	98.738	535	0,54
19	Kota Pariaman	64.836	290	0,45
Sumatera Barat		3.509.227	36.389	10,37

Sumber : DKS (D 2023), DKS (D 2024) dan Kemendagri Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (Jumlah)

Dari Tabel 21 tersebut dapat dilihat bahwa angka perceraian umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebesar 2,14 yang berarti bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dari 1.000 penduduk berusia 19 tahun keatas terjadi peristiwa perceraian sebanyak 2-3 kali;

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa angka perceraian umum tertinggi berada di Kota Payakumbuh sebesar 5,44 dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,52.

c. **Keluarga**

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

1) **Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga**

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada Tabel 22 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 1.804.826 keluarga yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 294.936 keluarga, kemudian disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 166.745 keluarga, Kabupaten Agam sebanyak 164.558 keluarga, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 141.780 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu 19.102 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3,22 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kabupaten/Kota juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dapat digunakan Pemerintah Provinsi dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

Tabel 22
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jrth)		KK (Jrth)		Rata-rata Jrth/KK
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kabupaten Dharmasraya	513.759	8,17	109.747	9,29	5,20
2	Kabupaten Indragiri	111.075	7,39	229.348	7,10	5,23
3	Kabupaten Kepulauan	247.323	8,25	79.106	4,22	5,25
4	Kabupaten Tanah Datar	192.471	8,29	129.642	8,37	5,24
5	Kabupaten Padang Pariaman	408.110	7,27	141.290	7,96	5,23
6	Kabupaten Agam	523.254	9,26	194.559	9,12	5,24
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	412.799	8,32	159.561	7,44	5,30
8	Kabupaten Pasaman	119.437	5,59	94.144	8,23	5,33
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	97.837	1,68	27.759	1,54	5,53
10	Kabupaten Dharmasraya	242.192	8,16	25.408	4,21	5,28
11	Kabupaten Solok Selatan	181.525	8,12	39.157	5,06	5,29
12	Kabupaten Pasaman Barat	434.053	7,90	157.482	7,47	5,40
13	Kota Padang	946.963	16,27	294.936	16,34	5,27
14	Kota Solok	43.553	1,27	25.366	1,41	5,27
15	Kota Sawahlunto	44.579	1,16	22.007	1,23	5,12
16	Kota Padang Panjang	43.693	1,19	19.103	1,06	5,24
17	Kota Bukittinggi	341.993	2,44	82.150	2,33	5,16
18	Kota Parikumbuh	149.072	2,54	85.709	2,53	5,24
19	Kota Pariaman	197.855	3,29	31.943	1,75	5,29
	Sumatera Barat	3.452.339	100,00	1.080.629	100,00	5,24

Sumber: Data Kemakmuran Sosial (DKS) Sumatera (2024) (Jrth/06)

2) Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti asisten rumah tangga.

Tabel distribusi anggota keluarga berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 23 di bawah ini :

Tabel 23
Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Jenis Hubungan Dalam Keluarga	Laki-Laki (Jawa)		Perempuan (Jawa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kepala Keluarga	1.402.953	49,28	1.094.875	13,77	2.497.828	33,05
2.	Spouse	79	0,00	0	0,00	79	0,00
3.	Putri	0	0,00	1.224.091	42,23	1.224.091	16,03
4.	Anak	1.495.537	50,34	1.218.456	42,46	2.713.993	35,81
5.	Menantri	33	0,00	30	0,00	63	0,00
6.	Cucu	13.543	0,43	10.799	0,36	24.342	0,32
7.	Cucu Pula	475	0,01	4.592	0,23	5.067	0,07
8.	Mertua	1.864	0,06	15.309	0,52	17.173	0,23
9.	Family Lain	11.737	0,39	20.077	0,70	31.814	0,42
10.	Family Lain	0	0,00	16	0,00	16	0,00
11.	Lainnya	4.267	0,14	3.541	0,12	7.808	0,10
	TOTAL	2.901.032	100	2.497.828	100	5.398.860	100

Sumber : Data kependudukan BPS (DKP) Provinsi Sumatera Barat (2024)

Dari Tabel 23 dapat kita ketahui bahwa status hubungan keluarga dengan kepala keluarga yang terbesar adalah anak sebanyak 2.684.033 jiwa (46,11 persen). Dari Tabel 23 juga terlihat bahwa terdapat jumlah Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 398.875 jiwa (13,77 persen). Ini terjadi karena adanya perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup yang akhirnya terpaksa menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga.

3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan

analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel kepala keluarga menurut umur dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah, dimana terlihat bahwa kepala keluarga terbesar jumlahnya berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 215.149 jiwa (11,92 persen) dimana jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada pada kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 191.277 jiwa (13,60 persen) dan kepala keluarga perempuan terbesar berada pada kelompok umur > 75 tahun sebanyak 66.019 jiwa (16,55 persen). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana mulai pada kelompok umur 45-49, jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami hal sebaliknya dengan mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan dengan keterampilan-keterampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, kelak bila sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 24.
Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jwa)		Perempuan (Jwad)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	00-04	20	0,00	22	0,01	42	0,00
2	05-09	34	0,00	20	0,01	54	0,00
3	10-14	65	0,00	82	0,02	147	0,01
4	15-19	1.230	0,03	1.222	0,03	2.452	0,14
5	20-24	21.366	1,52	6.005	1,31	27.371	1,32
6	25-29	92.072	6,55	10.003	2,52	102.075	5,44
7	30-34	144.342	10,27	12.272	3,08	156.614	8,45
8	35-39	171.463	12,20	17.426	4,37	188.889	10,47
9	40-44	191.227	13,60	23.872	5,98	215.100	11,43
10	45-49	179.362	12,75	30.341	7,66	209.703	11,63
11	50-54	155.972	11,08	36.309	9,10	192.281	10,65
12	55-59	132.897	9,45	43.882	11,00	176.780	9,80
13	60-64	110.170	7,85	50.029	12,54	160.199	8,89
14	65-69	59.100	4,33	54.984	13,75	114.084	6,02
15	70-74	41.649	2,98	46.237	11,59	87.886	4,58
16	> 75	33.925	2,44	66.018	16,53	100.943	5,43
	Total	1.405.951	100,00	796.375	100,00	2.202.326	100,00

Sumber: Data Kemendesa Kowil, 2023; Angket B 2024 (jwbk)

4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan

bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel kepala keluarga menurut jenis kelamin dan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 disajikan dalam Tabel 25 berikut ini :

Tabel 25.
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki (Jumlah)		Perempuan (Jumlah)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Padang Sidempuan	111.441	6,7%	65.321	6,6%	176.762	6,2%
2	Kabupaten Sibolga	11.886	7,8%	20.282	7,9%	32.168	7,1%
3	Kabupaten Agul-agul	21.661	4,7%	14.427	3,6%	36.088	4,2%
4	Kabupaten Tanah Datar	41.271	6,7%	55.746	7,1%	97.017	6,4%
5	Kabupaten Padang Pariaman	217.421	7,7%	96.571	4,1%	313.992	7,4%
6	Kabupaten Pagarumean	122.791	6,8%	60.788	10,2%	183.579	6,1%
7	Kabupaten Long Sempit Kota	101.022	1,1%	14.291	8,1%	115.313	2,6%
8	Kabupaten Payakumbuh	71.471	5,1%	20.488	5,1%	91.959	5,2%
9	Kabupaten Naga Malintang	27.271	1,6%	4.441	1,1%	31.712	1,7%
10	Kabupaten Dharmasraya	47.281	6,1%	12.031	3,7%	59.312	4,2%
11	Kabupaten Solok Selatan	44.791	3,1%	10.031	2,1%	54.822	3,6%
12	Kabupaten Pesisir Barat	111.441	7,6%	26.471	6,6%	137.912	7,8%
13	Kota Padang	211.911	16,6%	61.171	11,6%	273.082	16,7%
14	Kota Solok	21.541	1,6%	4.791	1,1%	26.332	1,4%
15	Kota Sawahlangu	17.241	1,2%	4.791	1,1%	22.032	1,2%
16	Kota Padang Panjang	17.081	1,1%	1.031	1,1%	18.112	1,1%
17	Kota Bukittinggi	11.791	2,6%	8.441	2,7%	20.232	2,4%
18	Kota Payakumbuh	11.721	1,6%	1.791	1,1%	13.512	1,1%
19	Kota Pematang	22.741	1,6%	2.031	1,1%	24.772	1,1%
	Sumatera Barat	1.441.791	100,0%	1.441.471	100,0%	2.883.262	100,0%

Sumber : Data Kemendagri BPS (2024) Sumatera II 2024 (2024)

Dari Tabel 25 tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Provinsi Sumatera Barat adalah laki-laki yaitu sebanyak 1.405.951 jiwa, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 398.875 jiwa atau dengan perbandingan 4 : 1, yang artinya dari 4 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Hal yang sama juga terlihat di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dimana kepala keluarga laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan dengan perbandingan terbesar berada di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 5 : 1, dan selanjutnya perbandingan terbesar juga terlihat di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok yaitu 4 : 1 dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dengan perbandingan 2 : 1. Dari Tabel 25 juga dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada di Kota Padang sebanyak 231.905 jiwa (16,49 persen), sedangkan untuk kepala keluarga perempuan terbesar juga berada di Kota Padang yaitu sebanyak 63.031 jiwa (15,80 persen).

5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh

lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel kepala keluarga berdasarkan status kawin dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 26, dimana terlihat bahwa kepala keluarga berstatus kawin yaitu sebesar 1.361.284 jiwa (75,42 persen), dan pada umumnya laki-laki yaitu sebanyak 1.279.627 jiwa (91,02 persen). Kepala keluarga yang berstatus belum kawin hanya 68.274 jiwa (3,78 persen) saja.

Tabel 26.
Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Status Kawin	Laki-laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	16.956	5,74	21.318	5,58	40.274	3,78
2	Kawin	1.279.627	91,02	846.657	20,67	1.361.284	75,42
3	Cerai Hidup	55.472	2,54	85.432	16,40	101.104	7,40
4	Cerai Mati	43.898	3,21	150.866	42,29	275.144	15,11
	Total	1.409.353	100	398.673	100	1.798.026	100

Sumber: Data Kominfo/Statistik (DKS) Sumatera Barat 2024 (skala 1000)

Meskipun demikian perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian. Kepala keluarga yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati, persentase perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu masing-masing 16,40 persen cerai hidup dan 57,78 persen berstatus cerai mati. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai

pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu proporsi perempuan kepala keluarga yang cukup besar (20,47 persen), diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 3,78 persen. Proporsi kepala keluarga laki-laki yang belum kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Ada kecenderungan yang terjadi, jika seorang perempuan mengalami peristiwa perceraian baik cerai hidup maupun kematian, maka ketika dia melakukan perkawinan berikutnya, sering kali mereka tidak melaporkan perkawinannya. Ini terjadi karena kebanyakan mereka melakukan perkawinan siri baik dengan laki-laki yang sudah berstatus duda (tapi tidak cerai secara resmi) maupun dengan laki-laki yang masih berstatus

suami perempuan lain, sehingga yang bersangkutan agak sungkan melaporkan perkawinan yang mereka alami. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama agar selalu mensosialisasikan tentang pentingnya pernikahan dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau bagi yang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki buku nikah, dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama sehingga perkawinannya tercatat secara hukum negara dan diakui oleh negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi haknya secara hukum.

6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga itu.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 27 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga yang terbesar adalah tamat SLTA/ sederajat sebanyak 553.068 jiwa (30,64 persen), kemudian diikuti dengan pendidikan Tamat SD/ sederajat sebanyak

490.924 jiwa (27,20 persen), dan SLTP/ sederajat sebanyak 311.389 jiwa (17,25 persen). Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,83 persen dan S1/S2/S3 sebesar 8,36 persen, dan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD persentasenya mencapai 13,71 persen.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih berpendidikan SLTA ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga sedang berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Provinsi Sumatera Barat agar mempunyai daya saing global. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Tabel 27.
Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Laki-laki (orang)		Perempuan (orang)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Tidak Sekolah	48.413	3,24	22.442	8,45	74.351	4,12
2	Belum Tamat SD/Sederajat	118.165	8,42	26.845	10,21	179.224	9,59
3	Tamat SD/Sederajat	349.742	24,55	181.232	69,04	499.924	27,20
4	SLTP/Sederajat	253.477	18,09	52.712	14,47	311.299	17,24
5	SLTA/Sederajat	168.205	12,07	82.847	21,03	353.068	19,64
6	Diploma I/II	7.853	0,57	4.642	1,16	12.541	0,70
7	Akademi/Diploma III/Sarjana	83.745	2,19	7.426	1,91	98.361	2,15
8	Diploma IV/Sarjana I	117.218	3,24	19.236	4,92	137.031	7,59
9	Sarjana II	11.372	0,61	1.426	0,37	12.853	0,71
10	Sarjana III	871	0,02	127	0,04	1.129	0,06
	Total	1.400.451	100	799.875	100	2.200.322	100

Sumber: Data Ekowalita Survei (DEKS) Semester II 2024 (2024)

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa lebih separuh (56,07 persen) kepala keluarga perempuan yang tidak bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Melihat status pendidikan, umur dan jenis kelamin, nampak bahwa kepala keluarga perempuan berada pada umur yang relatif lebih tua dari berpendidikan rendah dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki.

7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar

sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Tabel distribusi kepala keluarga menurut status bekerja dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah ini :

Tabel 28.
Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No.	Status Bekerja	Laki-Laki (Jawa)		Perempuan (Jawa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	1.348.519	89,92	89.969	22,56	1.438.488	75,79
2	Selama/Tidak Bekerja	18.337	1,31	18.346	3,00	36.683	1,91
3	Nelayar/mahasiswa	12.217	0,87	7.356	1,84	19.573	1,08
4	Pensiunan	26.729	1,90	16.574	2,65	43.303	2,27
5	Mengurus Rumah Tangga	129	0,01	276.610	69,35	276.739	15,33
	Total	1.488.351	100	388.875	100	1.877.226	100

Sumber: Data Konsolidasi Berekh (DKB) Semester II 2024 (Jawa)

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya sebesar 0,01 persen sedangkan kepala keluarga perempuan yakni sebesar 69,35 persen. Untuk kepala keluarga

yang belum/tidak bekerja per kondisi 31 Desember 2024 sebanyak 32.703 jiwa (1,81 persen), dimana proporsi kepala keluarga laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan. Ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga. Disamping itu terdapat pula kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 2,07 persen dengan proporsi jumlah pensiunan kepala keluarga laki-laki lebih besar dari pensiunan kepala keluarga perempuan. Hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya instansi terkait dalam hal penyediaan program-program yang memperhatikan para manula yang sudah tidak produktif lagi.

Disamping itu, dari Tabel 28 juga terlihat bahwa terdapat 19.573 jiwa (1,08 persen) kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Walau data ini perlu ditelusuri lagi kebenarannya, namun demikian, bukan tidak mungkin ada kepala keluarga yang memang masih usia sekolah, dikarenakan orang tuanya sudah meninggal atau karena alasan permasalahan sosial masyarakat lainnya sehingga yang bersangkutan terpaksa menanggung beban keluarga dalam melanjutkan kehidupannya. Bagi mereka itu mungkin perlu perhatian dari Dinas Pendidikan khususnya dalam hal menjamin ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan bagi mereka sehingga mereka bisa mandiri dan bisa mencapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik.

d. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran (fertilitas) adalah :

1) Jumlah Kelahiran

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersaji pada Tabel 29 di bawah ini :

Tabel 29.
Jumlah Kelahiran Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1.826	1.364	3.190
2	Kabupaten Indragiri	2.517	2.797	5.314
3	Kabupaten Solok	1.684	1.089	2.773
4	Kabupaten Tanah Datar	1.730	1.739	3.469
5	Kabupaten Padang Pariaman	3.040	3.020	6.060
6	Kabupaten Agam	3.021	2.790	5.811
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.545	2.279	4.824
8	Kabupaten Pasaman	2.018	2.051	4.069
9	Kabupaten Kap. Mentawai	734	689	1.423
10	Kabupaten Dharmasraya	1.371	1.652	3.023
11	Kabupaten Solok Selatan	1.131	1.176	2.307
12	Kabupaten Pasaman Barat	2.571	3.393	5.964
13	Kota Padang	7.050	6.914	13.964
14	Kota Solok	359	368	727
15	Kota Sawahlangu	382	365	747
16	Kota Padang Panjang	345	331	676
17	Kota Bukittinggi	1.089	1.072	2.161
18	Kota Payakumbuh	1.074	963	2.037
19	Kota Pariaman	676	660	1.336
SUMATERA BARAT		38.890	37.233	76.123

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (2024)

Dari Tabel 29 tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 76.123 dengan proporsi laki-laki sebanyak 38.890 jiwa dan perempuan 37.233 jiwa. Bila dilihat dari proporsi tersebut jumlah kelahiran hidup yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan perempuan.

Dari Tabel 29 juga dapat dilihat jumlah kelahiran hidup terbesar berada di Kota Padang sebesar 13.964 kelahiran, yang memang Kota Padang adalah Kota yang memiliki jumlah penduduk

terbesar di Sumatera Barat. Sedangkan kelahiran hidup terendah berada di Kota Sawahlunto yaitu hanya sebesar 745 kelahiran.

2) **Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)**

Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 30, yaitu sebesar 13,16, yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2024 terjadi 13-14 kelahiran hidup.

Secara Kabupaten/Kota, dari Tabel 30 juga dapat dilihat CBR terbesar berada di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 15,49, ini berarti selama tahun 2024, dari 1.000 penduduk Kabupaten Pasaman Barat, terdapat sebanyak 15-16 kelahiran hidup. Sedangkan CBR yang terendah berada di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 9,10, yang berarti bahwa selama tahun 2024, dari 1.000 penduduk Kabupaten Tanah Datar, hanya terjadi sebanyak 9-10 kelahiran hidup.

Tabel 30.
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jwa)		Crude Birth Rate (CBR)
		Tada Pertengahan Tahun	Jumlah Kelahiran	
1	Kabupaten Pasisir Selatan	531.084	7.187	13,55
2	Kabupaten Solok	410.750	5.522	13,44
3	Kabupaten Sijunjung	245.833	3.252	13,23
4	Kabupaten Tanah Datar	381.701	3.472	9,10
5	Kabupaten Padang Pariaman	456.261	6.060	13,27
6	Kabupaten Agam	531.680	5.811	10,93
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	400.256	4.823	12,05
8	Kabupaten Pasaman	311.520	4.069	13,06
9	Kabupaten Kep. Mentawai	96.453	1.443	14,96
10	Kabupaten Dharmastaya	239.958	3.223	13,43
11	Kabupaten Solok Selatan	182.049	2.327	12,78
12	Kabupaten Pasaman Barat	449.746	6.966	15,49
13	Kota Padang	940.915	13.964	14,84
14	Kota Solok	84.016	1.119	13,32
15	Kota Sawahlunto	68.471	743	10,88
16	Kota Padang Panjang	63.313	766	12,10
17	Kota Bukittinggi	140.169	2.161	15,42
18	Kota Payakumbuh	147.925	1.877	12,69
19	Kota Pariaman	102.758	1.336	13,00
	Sumatera Barat	5.785.349	76.123	13,16

Sumber : DKB D 2023, DKB D 2024, dan Data Kesehatan Prov. Sumbar (ditolah)

e. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari 3 (tiga) komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Indikator kematian berguna untuk

memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam angka (rate) yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kematian di suatu daerah. Sedangkan indikator kematian dari sisi kuantitas antara lain :

1) Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu.

Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya.

Tabel 31.
Jumlah Kematian
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jawa)	
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Kematian
1	Kabupaten Pasia Selatan	521.184	3.041
2	Kabupaten Solok	412.750	2.811
3	Kabupaten Niasjunga	245.813	1.287
4	Kabupaten Tanah Datar	391.201	3.120
5	Kabupaten Padang Pariaman	458.704	2.463
6	Kabupaten Agul	531.688	3.372
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	620.236	3.238
8	Kabupaten Pasaman	311.820	2.326
9	Kabupaten Nag. Mentawai	96.433	377
10	Kabupaten Dharmasraya	229.898	1.282
11	Kabupaten Solok Selatan	182.049	1.563
12	Kabupaten Pasaman Barat	448.746	2.309
13	Kota Padang	940.915	3.623
14	Kota Solok	84.016	421
15	Kota Sawahlunto	68.471	439
16	Kota Padang Panjang	63.313	305
17	Kota Bukittinggi	140.149	990
18	Kota Payakumbuh	147.825	894
19	Kota Pariaman	102.296	874
	Sumatera Barat	5.795.349	35.851

Sumber: DKBH 2024 dan DKBH 2024 (seolah)

Dari Tabel 31 dapat diketahui bahwa jumlah kematian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebesar 38.857

2) *Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR)*

Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersaji pada Tabel 32, dimana data jumlah kematian merupakan data pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diperoleh dari pelaporan kematian yang dilakukan oleh penduduk yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 32.
Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jawa)		Crude Death Rate (CDR)
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Kematian	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	501.084	5.001	5,65
2	Kabupaten Solok	410.750	2.811	6,84
3	Kabupaten Sijunjung	245.533	1.287	5,24
4	Kabupaten Tanah Datar	381.701	3.970	8,83
5	Kabupaten Padang Pariaman	486.764	2.951	6,47
6	Kabupaten Agam	501.609	3.972	7,47
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	489.236	3.208	8,00
8	Kabupaten Pasaman	311.520	2.378	7,63
9	Kabupaten Kep. Mentawai	96.451	329	3,91
10	Kabupaten Dharmasraya	219.978	1.792	6,63
11	Kabupaten Solok Selatan	182.040	1.363	5,99
12	Kabupaten Pasaman Barat	449.244	2.308	5,58
13	Kota Padang	940.915	5.630	5,98
14	Kota Solok	84.016	421	5,01
15	Kota Sawahlunto	88.471	419	6,12
16	Kota Padang Panjang	63.313	393	6,24
17	Kota Bukittinggi	140.169	990	7,06
18	Kota Payakumbuh	142.925	994	6,92
19	Kota Paripato	102.258	802	7,80
	Sumatera Barat	5.265.348	38.857	6,72

Sumber : BPS (2023 dan BPS (2024 (Juli))

Dari Tabel 32 dapat diketahui bahwa angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebesar 6,72 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2024 terjadi 6-7 kematian.

Secara Kabupaten/Kota, dari Tabel 32 juga dapat dilihat CDR terbesar berada di Kota Pariaman yaitu sebesar 9,33, ini berarti pada pertengahan tahun 2024, dari 1.000 penduduk Kota Pariaman, terjadi 9-10 kematian. Sedangkan CDR yang terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 3,91, yang berarti bahwa pada pertengahan tahun 2024, dari 1.000 penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya terjadi 3-4 kematian.

2. Kualitas Penduduk

a. Kesehatan

1) Kelahiran (Fertilitas)

a) Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*)

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, dengan demikian tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk Perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk Perempuan pada kelompok umur 35-39 tahun. Angka Kelahiran menurut umur (*ASFR*) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama.

Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yang berbeda. Sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Indikator ASFR juga akan digunakan untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan Masyarakat sumber perhitungan banyaknya penduduk umur 0-1 tahun ada perhitungan proyeksi penduduk.

Tabel 33.
Angka kelahiran menurut Umur (ASFR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah Perempuan (Jwa)	Jumlah Kelahiran Hidup (Jsa)	Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
15-19 Tahun	220.918	2.518	11,4
20-24 Tahun	220.165	18.086	76,70
25-29 Tahun	183.300	275.716	150,50
30-34 Tahun	159.932	19.269	120,50
35-39 Tahun	168.180	13.353	79,40
40-44 Tahun	177.118	4.817	27,20
45-49 Tahun	160.461	434	2,7

Sumber : DPA/PSDC Provinsi Sumatera Barat dan BKKBN Provinsi Sumatera Barat (ipahala)

Dari Tabel 33 dapat diketahui bahwa angka kelahiran menurut umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) menurut kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 11,4, kelompok umur 20-24 tahun sebesar 76,70, kelompok umur 25-29 tahun sebesar 150,50, kelompok umur 30-34 tahun 120,50, 35-39 tahun sebesar 79,40, 40-44 tahun sebesar 27,20 dan umur 45-49 tahun 2,7.

ASFR terendah pada kelompok umur 45-49 tahun, umur 15-19 dan umur 40-44 tahun dan kelompok tertinggi pada kelompok

umur 25-29 tahun sebesar 150,50 artinya bahwa dari 1000 perempuan berumur 25-29 tahun terjadi 150-151 kelahiran hidup.

Tabel 34
Angka kelahiran menurut Umur (ASFR) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR)						
		15-19 Tahun	20-24 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun
1	Kabupaten Pesisir Selatan	114	86,8	154,9	132,1	81,2	27,8	2,0
2	Kabupaten Solok	124	87,3	133,8	110,1	23,8	8,4	1,4
3	Kabupaten Nagari	18,1	88,4	109,6	111,9	75,8	20,4	2,4
4	Kabupaten Tanah Datar	8,4	112	146,2	133,1	87,1	20,1	2,2
5	Kabupaten Pesisir Pariaman	6,1	88,3	140,2	130,1	86,1	30,4	2,9
6	Kabupaten Agul	9,1	102	136,2	122,1	86,1	20,1	1,9
7	Kabupaten Lela Duku Kudu	10,1	89,3	147,8	133,1	76,1	26,1	2,0
8	Kabupaten Limau	12,2	84,1	149,1	127,1	76,1	20,1	1,9
9	Kabupaten Kayu Manis	11,1	100,4	142,1	110,1	72,1	20,1	1,9
10	Kabupaten Dharmasraya	12,2	89,2	140,1	129,1	80,1	11,4	1,1
11	Kabupaten Suluak Selatan	20,1	86,1	122,8	111,1	70,1	26,1	2,8
12	Kabupaten Pesisir Sembilan	12,1	89,4	147,1	122,1	76,1	20,1	1,9
13	Kota Padang	1,9	121	100,2	109,4	20,1	21,1	1,8
14	Kabupaten	10	76,1	140,1	120,1	70,1	20,1	1,9
15	Kota Sawahlawan	11,1	89,1	130,1	114,1	70,1	20,1	1,9
16	Kota Padang Panjang	10,1	91,1	130,1	122,1	70,1	20,1	1,9
17	Kota Bukittinggi	1,1	70,1	125,1	110,1	80,1	20,1	1,9
18	Kota Payakumbuh	1,1	90,1	130,1	110,1	80,1	20,1	1,9
19	Kota Pariaman	1,9	89,1	147,1	145,1	70,1	20,1	1,9
	Rata-rata	11,1	91,1	130,1	120,1	70,1	20,1	1,9

Sumber: DPSPDPR Provinsi Sumatera Barat dan BPSAN Provinsi Sumatera Barat (2024)

b) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15-49 tahun).

Informasi angka fertilitas total (TFR) di suatu daerah akan berguna bagi para pengambil keputusan dan perencana dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan, reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

- TFR = Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total
 ASFR_i = ASFR kelompok Umur i
 i = Kelompok umur yaitu 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49

Dari tabel 33 bisa dihitung untuk *Total Fertility Rate*nya yaitu

$$\begin{aligned} TFR &= 5 \times (11,4+76,70+150,50+120,50+79,40+27,20+2,7) \\ &= 5 \times 468 \\ &= 2.340 \\ &= 2.340/1.000 = 2,34 \end{aligned}$$

Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebesar 2,34 artinya bahwa pada setiap perempuan di Provinsi Sumatera Barat akan melahirkan anak sebanyak 2-3 anak sampai akhir masa reproduksinya (15-49 tahun).

c) Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan ini digunakan untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk.

Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 35 di bawah ini :

Tabel 35.
Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
1	Kabupaten Tanah Selayan	157.863	17.422	27,88
2	Kabupaten Solok	108.813	27.980	26,41
3	Kabupaten Sijunjung	95.342	14.720	25,91
4	Kabupaten Tanah Datar	95.138	22.323	23,97
5	Kabupaten Padang Pariaman	115.010	29.014	25,67
6	Kabupaten Agam	130.803	33.476	25,72
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	100.429	25.214	24,96
8	Kabupaten Pasaman	81.947	22.135	26,99
9	Kabupaten Kpg. Mentawai	24.582	4.702	25,43
10	Kabupaten Dharmasraya	66.078	17.032	25,78
11	Kabupaten Solok Selatan	48.030	12.374	27,83
12	Kabupaten Pasaman Barat	122.832	36.819	29,49
13	Kota Padang	240.544	48.003	27,88
14	Kota Solok	23.028	4.831	27,68
15	Kota Sawahlunto	17.563	4.521	24,04
16	Kota Padang Panjang	14.156	4.438	28,53
17	Kota Bukittinggi	37.794	10.456	27,67
18	Kota Payakumbuh	38.899	11.233	28,88
19	Kota Pariaman	24.548	7.832	28,48
	Sumatera Barat	1.488.710	402.741	26,83

Sumber: Data Konsolidasi Hasil Sensus 11 Tahun 2024 (Bakind)

Dari Tabel 35 tersebut menunjukkan angka CWR Provinsi Sumatera Barat sebesar 26,83 persen artinya bahwa pada tahun 2024 per 31 Desember 2024 terdapat 26-27 anak di bawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun.

Bila diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase *Child Woman Ratio (CWR)* terbesar berada pada Kota Solok yaitu sebesar 29,66 persen, selanjutnya adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan *Child Woman Ratio (CWR)* sebesar 29,49 persen, sedangkan untuk persentase *Child Woman Ratio (CWR)* terkecil berada pada Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebesar 23,97 persen.

2) **Kematian (*Mortalitas*)**

Tinggi rendahnya tingkat kematian (*mortalitas*) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh : faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah :

a) Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR/AKB*)

Kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam

tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau *post-neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk Provinsi Sumatera Barat, AKB/IMR tahun 2024 dapat dilihat dari Tabel 36 di bawah ini :

Tabel 36:
Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kematian 2024				Rasio per 1.000			
		Jumlah	Perempuan	Laki-laki	%	Perempuan	Laki-laki	Rata-rata	Min-Max
1	Kabupaten Pasiajahan	140	130	10	100	40	10	24	10-50
2	Kabupaten Solok	1.200	1.100	100	100	34	26	30	10-50
3	Kabupaten Singingi	1.000	1.000	0	100	28	0	14	10-50
4	Kabupaten Tanah Datar	1.200	1.100	100	100	25	11	18	10-50
5	Kabupaten Padang Pariaman	1.000	1.000	0	100	21	11	16	10-50
6	Kabupaten Agam	1.000	1.000	0	100	20	10	15	10-50
7	Kabupaten Tanah Tinggi Solok	1.000	1.000	0	100	18	17	17	10-50
8	Kabupaten Pesisir	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	700	600	100	100	18	11	14	10-50
10	Kabupaten Dharmasraya	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
11	Kabupaten Solok Selatan	1.000	1.000	0	100	18	11	14	10-50
12	Kabupaten Pesisir Barat	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
13	Sikre Padang	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
14	Sikre Solok	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
15	Sikre Solok Selatan	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
16	Sikre Padang Pariaman	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
17	Sikre Kerinci	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
18	Sikre Pesisir Selatan	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
19	Sikre Pasaman	1.000	1.000	0	100	18	10	14	10-50
	Provinsi Sumatera Barat	10.000	9.000	1.000	100	20	10	15	10-50

Sumber: BPS Sumatera Barat, Profil Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat 2024

Dari Tabel 36 terlihat bahwa selama tahun 2024, dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat, terjadi kematian bayi sebanyak 9-10 orang. Kematian bayi terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 24-25 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi ini cukup tinggi, dan faktor yang menyebabkannya adalah rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai standar, rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai yang dianjurkan, kurangnya partisipasi keluarga, masyarakat dan lintas program dalam program kesehatan

ibu dan anak, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita serta kurangnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

b) Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)

Kematian *neonatal* atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Angka kematian *neonatal* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 37 berikut ini :

Tabel 37.
Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Komponen	Kematian Bayi				Kematian Neonatal				Rasio (%)
		Jumlah	Perempuan	Per 1.000 Anak	R	Jumlah	Perempuan	Per 1.000 Bayi	R	
1	Calcutta Free-Allen	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2	Langkat Jaya	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Labuhan Alang	198	198	198	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	Langkat Gadang	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
46	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
52	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
56	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
57	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
59	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
61	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
62	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
63	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
64	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
65	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
66	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
67	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
68	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
69	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
70	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
71	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
74	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
75	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
76	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
77	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
78	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
79	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
80	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
81	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
82	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
83	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
84	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
85	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
86	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
87	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
88	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
89	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
90	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
91	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
92	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
93	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
94	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
95	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
96	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
97	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
98	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
99	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
100	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
101	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
102	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
103	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
104	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
105	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
108	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
109	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
110	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
111	Langkat Negeri	200	200	200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
112	Calcutta Free-Allen	170	170	170	0,00	0	0	0	0,00	0,00
113	Langkat Pagar Alam	200	200	200	0,00	0	0			

Dari Tabel 37 dapat dilihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, terjadi kematian bayi *neonatal* sebanyak 7 bayi. Kematian bayi *neonatal* terbanyak terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 10 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi *neonatal* ini disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia (kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir, TN (gangguan pemapasan pada bayi baru lahir yang berlangsung singkat), sepsis (infeksi darah yang terjadi pada bayi yang baru lahir), kelainan bawaan, dan penyebab lainnya.

c) Angka Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)

Kematian *post neo-natal* (*post neo-natal death rate/PNNDR*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Angka Kematian *Post Neo-Natal* Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 38, dimana dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, terjadi kematian bayi *post neo-natal* sebanyak 2-3 bayi dengan kematian bayi *post neo-natal* terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 14-15 bayi dan yang terendah adalah Kota Padang Panjang dengan kematian bayi *post neo-natal* pada tahun 2024 hanya sebanyak 0 bayi atau tidak ada kematian bayi *post neo-natal*.

Adapun penyebab kematian bayi *post neo-natal* ini adalah karena beberapa penyakit seperti pneumonia (paru-paru basah), diare, kelainan saraf, tetanus malaria, dan penyakit lainnya.

Tabel 38.
Angka Kematian *Post Neonatal* (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bayi				Kematian <i>Post Neonatal</i>				PNNDR (per 1.000)
		Jumlah Lahir	Terpapar Demam	Terpapar Diare	TOTAL	Jumlah Kematian	Terpapar Demam	Terpapar Diare	TOTAL	
1	Kabupaten Tanah Datar	1.138	1.131	1.137	3.406	0	0	0	0,00	0,00
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.049	1.038	1.020	3.107	0	0	0	0,00	0,00
3	Kabupaten Solok	1.046	1.040	1.030	3.116	0	0	0	0,00	0,00
4	Kabupaten Tanah Karo	1.176	1.176	1.172	3.524	0	0	0	0,00	0,00
5	Kabupaten Pangkajene Arasan	1.046	1.038	1.040	3.124	0	0	0	0,00	0,00
6	Kabupaten Agam	1.102	1.098	1.111	3.311	0	0	0	0,00	0,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	930	928	925	2.783	0	0	0	0,00	0,00
8	Kabupaten Dharmasraya	1.040	1.031	1.030	3.101	0	0	0	0,00	0,00
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	770	767	770	2.307	0	0	0	0,00	0,00
10	Kabupaten Namurok	1.071	1.065	1.070	3.206	0	0	0	0,00	0,00
11	Kabupaten Tanah Abian	1.110	1.104	1.107	3.321	0	0	0	0,00	0,00
12	Kabupaten Gunung Siat	1.031	1.021	1.030	3.082	0	0	0	0,00	0,00
13	Kota Padang	1.076	1.070	1.066	3.212	0	0	0	0,00	0,00
14	Kota Dink	49	48	47	144	0	0	0	0,00	0,00
15	Kota Payakumbuh	190	187	187	564	0	0	0	0,00	0,00
16	Kota Padang Panjang	49	48	48	145	0	0	0	0,00	0,00
17	Kota Solok	1.046	1.038	1.030	3.114	0	0	0	0,00	0,00
18	Kota Sawahlau	1.071	1.065	1.070	3.206	0	0	0	0,00	0,00
19	Kota Padang	49	48	47	144	0	0	0	0,00	0,00
	Jumlah Total	10.648	10.598	10.591	31.837	0	0	0	0,00	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (2024).

d) Angka Kematian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam/di sekitar rumah.

Angka kematian anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut ini :

Tabel 39.
Angka Kematian Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi (dari 100 Tahun) pada Pertengahan Tahun		Kematian Anak				AK (per 1.000)
		Jumlah (orang)	%	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (orang)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	29.387	0,84	4	8	12	20,67	0,36
2	Kabupaten Pasak	28.909	0,84	8	8	16	8,00	0,00
3	Kabupaten Sijunjung	24.988	0,24	3	2	5	5,02	0,07
4	Kabupaten Tanah Datar	20.841	0,50	3	2	5	5,59	0,08
5	Kabupaten Padang Pariaman	20.881	0,50	2	3	5	2,76	0,04
6	Kabupaten Agul	20.029	0,37	2	3	5	25,00	0,04
7	Kabupaten Lurah Pulau Kota	20.044	0,27	4	3	7	35,28	0,00
8	Kabupaten Pasaman	20.044	0,71	0	2	2	2,76	0,00
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	6.291	0,79	2	1	3	4,12	0,04
10	Kabupaten Dharmasraya	15.572	0,26	1	1	2	2,76	0,01
11	Kabupaten Pasak Selatan	12.008	0,40	0	0	0	0,00	0,00
12	Kabupaten Pasaman Barat	11.001	0,33	0	0	0	0,00	0,00
13	Kota Padang	98.431	0,56	1	3	4	1,39	0,00
14	Kota Solok	9.402	0,48	0	2	2	8,00	0,00
15	Kota Sawahlunto	2.980	0,13	2	2	4	3,36	0,00
16	Kota Padang Pariang	4.200	0,30	0	0	0	0,00	0,00
17	Kota Bukittinggi	9.112	0,50	1	2	3	7,59	0,01
18	Kota Payakumbuh	8.671	0,73	2	2	4	6,94	0,02
19	Kota Pariaman	8.431	0,87	4	1	5	6,04	0,07
	Sumatera Barat	203.001	0,20	44	38	82	1,00	0,20

Sumber: BPS/71 Tahun 2024, BPS/71 Tahun 2024 dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (2024)

Dari Tabel 39 di atas terlihat bahwa angka kematian anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah 0,20 yang berarti dari 1.000 anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, terdapat 0-1 kematian anak, dimana angka kematian anak tertinggi terdapat di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 1 (satu) kematian anak dari 1.000 anak.

Kematian anak ini diantaranya disebabkan oleh penyakit seperti diare, pneumonia, demam berdarah dan lainnya.

Oleh karena itu faktor kesehatan lingkungan sangat perlu diperhatikan untuk mendukung kesehatan anak, karena pada usia ini anak sedang aktif-aktifnya melakukan eksplorasi terhadap berbagai hal yang ingin diketahuinya.

e) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi baru lahir berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun (0-4 tahun).

Angka kematian Balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 40 dibawah ini.

Tabel 40.
Angka Kematian Balita
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Penduduk 0-4 tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Balita				AK Balita
		Jumlah (orang)	%	Laki-laki	Pemuaian	Perempuan (orang)	%	
1	Kabupaten Pasiah Salajan	16.148	8,40	48	34	84	10,98	3,25
2	Kabupaten Solok	29.268	4,87	34	26	60	7,45	3,11
3	Kabupaten Surobangga	27.085	4,20	34	34	50	6,58	3,11
4	Kabupaten Tanah Datar	22.172	3,58	22	15	37	6,98	3,94
5	Kabupaten Padang Pariaman	25.697	3,25	12	28	31	3,85	4,01
6	Kabupaten Agam	34.001	8,38	56	58	85	11,06	3,62
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	25.498	6,29	46	20	66	8,20	3,29
8	Kabupaten Pesisir Selatan	22.475	3,58	24	16	40	6,97	3,78
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.798	1,68	25	18	34	3,72	5,99
10	Kabupaten Dharmasraya	17.149	4,72	22	14	39	8,96	5,27
11	Kabupaten Solok Selatan	13.498	3,75	14	14	24	5,84	5,77
12	Kabupaten Pesisir Barat	34.072	8,89	22	38	40	8,97	3,11
13	Kota Padang	66.608	14,94	48	52	102	12,58	1,87
14	Kota Solok	6.072	1,68	6	4	10	1,28	1,98
15	Kota Sawahluluo	4.832	1,11	5	6	11	1,34	3,79
16	Kota Padang Panjang	4.912	1,01	2	1	2	0,25	0,81
17	Kota Bukittinggi	10.592	2,78	15	9	24	2,96	3,29
18	Kota Payakumbuh	11.298	3,81	12	11	23	2,86	3,01
19	Kota Pariaman	7.441	1,93	14	11	21	3,11	3,39
	Sumatera Barat	405.702	100	434	381	865	798	1,98

Sumber: DKSII Tahun 2023, DKS II Tahun 2024 (for Data Kabupaten Pasiah Salajan (dikali)

Dari Tabel 40 tersebut dapat diketahui angka kematian balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar 1,98, ini berarti bahwa dari 1.000 balita di Provinsi Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2024, terjadi kematian balita sebanyak 1-2 balita, dimana angka kematian balita tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 5,59 atau 5-6 kematian balita dari 1000 balita yang ada dan diikuti oleh Kota Pariaman yaitu 3,19 atau 3-4 kematian balita dari 1000 balita yang ada.

Penyebab kematian balita ini selain karena faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya, pengaruh lingkungan luar, seperti tingkat kecukupan gizi, tingginya prevelensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau disekitar rumah.

f) Angka Kematian Ibu (Maternity Mortality Rate/MMR)

Kematian ibu ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Angka kematian ibu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 41 berikut ini :

Tabel 41.
Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu			Jumlah Kematian Ibu per 100.000				JK
		Jumlah	Perempuan	Laki-laki	2023	2024	2023	2024	
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	575	552	23	9	1	9	4	120,75
2.	Kabupaten NKK	241	237	4	7	7	2	7	14,27
3.	Kabupaten Solok	236	234	2	3	3	1	3	6,25
4.	Kabupaten Solok Hutan	173	171	2	1	1	4	1	29,93
5.	Kabupaten Padang Pariaman	136	133	3	3	3	3	3	14,54
6.	Kabupaten Agak	122	119	3	2	3	4	11	20,6
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	107	105	2	2	1	3	3	36,47
8.	Kabupaten Pasaman	104	101	3	4	4	1	7	22,89
9.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	75	69	6	7	6	7	4	27,2
10.	Kabupaten Dharmasraya	337	332	5	4	3	4	7	22,24
11.	Kabupaten Dairi	317	314	3	3	3	4	3	21,91
12.	Kabupaten Pesisir Barat	311	308	3	3	3	2	3	39,69
13.	Kota Padang	276	273	3	3	3	4	11	11,77
14.	Kota Solok	19	19	0	0	1	4	1	30,77
15.	Kota Sawahlunto	97	94	3	3	4	3	2	33,4
16.	Kota Padang Panjang	95	94	1	3	3	4	4	17,7
17.	Kota Bukittinggi	104	102	2	4	2	2	4	19,17
18.	Kota Padangkiri	113	99	14	6	6	4	3	29,43
19.	Kota Payakumbuh	27	26	1	3	3	4	3	13,7
	Jumlah Barat	3.646	3.591	55	34	36	41	36	23,38

Sumber: BPS Kabupaten Padang Panjang, Padang, 2024

Dari Tabel 41 terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 terjadi 123-124 kematian ibu. Kematian ibu terbesar terjadi di Kabupaten Kepulauan mentawai yaitu sebanyak 277,20 atau 277-278 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian ibu ini adalah karena pendarahan, HDK (hipertensi dalam kehamilan), infeksi, gangguan peredaran darah, gangguan metabolisme, dan lainnya.

Dari Tabel 41 dapat dilihat juga untuk penyebab kematian ibu selama masa kehamilan sebesar 24,47 %, masa bersalin sebesar 10,64 % dan saat nifas sebesar 64,89 %.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk baik di daerah maupun nasional. Untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan suatu daerah, dibutuhkan beberapa data. Database kependudukan dapat memberikan beberapa yang berhubungan dengan informasi perkembangan pendidikan maupun untuk menghitung beberapa indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah. Data jumlah penduduk menurut usia sekolah SD, SLTP, dan SLTA serta perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel-42 berikut ini :

Tabel 42.
Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Usia Pendidikan	JENIS KELAMIN (JKA)				Total (Jus)	
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Usia SD (7-11 Tahun)	321.343	45,75	297.510	33,11	618.853	32,45
Usia SLTP (13-15 Tahun)	347.245	17,54	325.699	17,24	672.944	17,47
Usia SLTA (16-18 Tahun)	144.656	15,41	141.202	15,75	285.858	17,54
Usia Perguruan Tinggi (18-24 Tahun)	314.411	19,25	303.548	19,91	617.959	19,53
Total	1.028.655	100	898.357	100	1.927.012	100

Sumber: Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat 2024 (GUSDA)

1) **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar.

Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya presentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK)/*gross enrollment ratio (GER)* Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 43 berikut ini :

Tabel 43.
Angka Partisipasi Kasar (APK)/ *Gross Enrollment Ratio (GER)*
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Students)	Penduduk (P) (Population)	APK (GER)
SD/Primary School	605.603	618.851	97,86
a. SD	507.570		
b. SLB	4.097		
c. MI	28.518		
d. Paket A	4.111		
e. ULA	1.307		
SLTP/Junior SS	321.927	323.264	99,59
a. SMP	202.018		
b. SLB	1.823		
c. MTs	95.133		
d. Paket B	15.019		
e. Wushu	7.934		
SLTA/Senior SS	282.544	287.838	98,16
a. SMA	133.806		
b. SLB	1.312		
c. MA	38.601		
d. SMK	85.619		
e. Paket C	19.628		
f. Ulya	3.578		

Sumber: DKB B. Tahun 2024. Formulasi/Statistik, Dinas Pendidikan Prov. Sumbar dan BPS Sumbar (2024)

Dari Tabel 43 tersebut dapat diketahui bahwa APK Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 97,86 persen, ini berarti pada jenjang Pendidikan SD ini sedikit anak-anak usia diatas 12 tahun yang masih sekolah di tingkat SD/ sederajat atau sebaliknya belum banyak siswa yang lebih muda dari usia standar (7-12 tahun) yang masuk jenjang pendidikan SD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 tahun 2021 usia prioritas untuk masuk sekolah dasar (SD) adalah 7 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan. Hal ini juga berlaku untuk jenjang pendidikan SLTP karena APK untuk jenjang SLTP di Provinsi

Sumatera Barat pada tahun 2024 dibawah 100 persen yaitu sebesar 99,59 persen berarti jumlah murid usia berapapun yang bersekolah pada jenjang SLTP lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia SLTP. Sementara untuk jenjang pendidikan SLTA APK juga berada dibawah 100 persen yaitu sebesar 98,16 persen, yang berarti jumlah murid usia berapapun yang bersekolah pada jenjang SLTA lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia SLTA.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni (APM)/*Net Enrollment Ratio (NER)* Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 44, dimana APM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat adalah 92,26 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 92-93 orang bersekolah dibangku SD/Sederajat. APM penduduk usia 13-15 tahun yang duduk dibangku SLTP/Sederajat sebesar 81,06 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, 81-82 orang bersekolah dibangku SLTP/Sederajat, sedangkan

APM penduduk usia 16-18 tahun yang duduk dibangku SLTA/Sederajat sebesar 79,09 persen, ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, 79-80 orang bersekolah dibangku SLTA/Sederajat. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi murid yang tinggal kelas, lambat masuk sekolah atau terlalu cepat sekolah.

Tabel 44.
Angka Partisipasi Murni (APM)/Net Enrollment Ratio (NER)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Salah/Meluluskan (Pass/Fail)	Peserta Ujian (Candidates)	APM (NER)
SD/Elementary School	570.853	618.851	92,25
a. SD	538.814		
b. SLB	2.502		
c. MI	25.769		
d. Paket A	1.399		
e. ULA	1.369		
SLTP/Junior SS	262.027	323.264	81,06
a. SMP	173.996		
b. SLB	542		
c. MTs	27.083		
d. Paket B	3.481		
e. Widyais	6.325		
SLTA/Senior SS	227.451	287.636	79,09
a. SMA	124.013		
b. SLB	304		
c. MA	39.771		
d. SMK	67.754		
e. Paket C	2.409		
f. Ulya	2.640		

Sumber: DKKP (2024), Ditjen Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas), Dinas Pendidikan, dan Statistik (Ditjen Statistik)

3) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah yang disajikan hanya berdasarkan data murid putus sekolah yang ada untuk jenjang pendidikan SD (SD), untuk jenjang pendidikan SLTP (SMP), serta jenjang pendidikan SLTA (SMA dan SMK) yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada Tabel 45 berikut ini :

Tabel 45.
Angka Putus Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	605.603	706	0,12
SLTP	321.927	246	0,08
SLTA	282.544	426	0,15

Sumber : Depdiknas Sumatera Barat dan Ditjen SD, Ditjen SLTP dan Ditjen SLTA Ditjen Pendidikan Dasar, Sumatera Barat.

Dari Tabel 45 tersebut dapat diketahui bahwa angka putus sekolah terbesar adalah untuk jenjang pendidikan SLTA. Beberapa penyebab murid putus sekolah diantaranya adalah karena kurangnya motivasi atau keinginan dari dalam diri anak itu sendiri untuk bersekolah. Selain itu faktor kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab lain seorang murid putus sekolah. Tidak dipungkiri, meskipun sudah ada dana yang dialokasikan pemerintah dalam hal pendidikan pada saat ini, tidak lantas menjadikan pendidikan di Sumatera Barat menjadi gratis sepenuhnya, karena masih ada biaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai pendidikan tersebut, seperti biaya transportasi, biaya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah, dan lainnya. Dengan kondisi tersebut, bagi orang tua dengan kondisi ekonomi yang rendah akan terbebani, karena penghasilan orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, sehingga keberlangsungan pendidikan anak akan terhambat.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih berperan aktif untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi ekonomi orang tua yang terbatas agar mereka tetap dapat melanjutkan sekolah paling tidak sampai lulus jenjang pendidikan SLTA agar mereka bisa memiliki bekal ilmu dan keahlian untuk terjun ke dunia kerja sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

c. Ekonomi

Indonesia telah meratifikasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan ini telah diaplikasikan dalam penyusunan statistik terkait ketenagakerjaan sehingga berdasarkan statistik dan indeks pembangunan ketenagakerjaan yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

1)1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Di samping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Jumlah dan proporsi tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 46 di bawah ini, dimana pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2024 adalah sebesar 4.387.407 jiwa atau 75,38 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja tersebut harus diikuti permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) yang cukup pula, agar tidak akan terjadi pengangguran yang cukup besar. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memikirkan tersedianya kesempatan kerja ini di masing-masing daerahnya.

Tabel 46.
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Ura Kerja (15 Tahun Keatas)	Jumlah Penduduk	Persan Negeri
1	Kabupaten Pasir Selatan	399.920	531.786	74,92
2	Kabupaten Solik	309.432	413.075	74,91
3	Kabupaten Sijunjung	185.664	247.323	75,07
4	Kabupaten Tanah Datar	300.726	382.674	78,09
5	Kabupaten Padang Pariaman	349.632	458.310	76,29
6	Kabupaten Agam	410.128	533.254	76,91
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	312.658	402.788	77,62
8	Kabupaten Pasaman	232.911	313.837	74,21
9	Kabupaten Kap. Mentawai	72.391	97.837	73,99
10	Kabupaten Dharmasraya	180.484	242.192	74,52
11	Kabupaten Solik Selatan	133.813	181.525	73,72
12	Kabupaten Pasaman Barat	326.918	454.053	72,00
13	Kota Padang	714.863	948.983	75,49
14	Kota Solik	62.575	85.553	73,14
15	Kota Sawahlunto	52.304	68.359	76,56
16	Kota Padang Panjang	47.629	63.895	74,54
17	Kota Bukittinggi	105.574	141.804	74,45
18	Kota Payakumbuh	111.747	149.077	74,96
19	Kota Pariaman	77.848	103.835	74,92
	Sumatera Barat	4.387.407	5.820.388	75,38

Sumber: Data Kependudukan Resmi (DKI) Sumatera II 2024 (Jilid 1)

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Tidak Bekerja)

Jumlah dan proporsi angkatan kerja (bekerja dan tidak bekerja) ini dapat dilihat pada Tabel 47, dimana dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar 3.165.526 jiwa dengan jumlah angkatan kerja terbanyak berada di Kota Padang yaitu sebesar 481.230 jiwa dan angkatan kerja terkecil berada di Kota Padang Panjang sebanyak 29.762 jiwa. Untuk penduduk bekerja dan tidak bekerja, jumlah

terbanyak juga berada di Kota Padang yaitu masing-masing sebesar 438.571 jiwa dan 42.659 jiwa. Sementara itu untuk jumlah penduduk bekerja dan tidak bekerja terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu masing-masing sebesar 27.745 jiwa dan 2.017 jiwa.

Tabel 47.
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja (Juta)			Jumlah Tenaga Kerja
		Bekerja	Mencari	Jumlah Angkat	
1	Kabupaten Pasiajahan	251.280	18.308	270.688	340.920
2	Kabupaten Solok	226.964	16.094	243.058	306.432
3	Kabupaten Sijunjung	123.709	12.337	146.046	183.663
4	Kabupaten Tanah Datar	305.264	15.314	320.578	380.776
5	Kabupaten Padang Pariaman	217.935	16.414	234.349	296.472
6	Kabupaten Agam	286.602	26.491	313.093	410.129
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	221.377	12.858	234.235	312.655
8	Kabupaten Pasaman	181.286	12.315	193.601	250.911
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	55.804	3.217	59.021	72.391
10	Kabupaten Dharmasraya	127.247	8.948	136.195	180.484
11	Kabupaten Solok Selatan	109.190	10.475	119.665	153.819
12	Kabupaten Pasaman Barat	209.934	17.989	227.923	296.938
13	Kota Padang	438.571	42.659	481.230	714.863
14	Kota Solok	40.181	2.349	42.530	50.775
15	Kota Sawahlunto	36.134	3.228	39.362	52.504
16	Kota Padang Panjang	27.745	2.017	29.762	42.624
17	Kota Bukittinggi	82.476	2.426	84.902	105.974
18	Kota Parikumbuh	74.685	3.781	78.466	111.247
19	Kota Pariaman	48.881	4.726	53.607	77.648
	Sumatera Barat	2.924.753	240.773	3.165.526	4.187.417

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2024. Data Diolah dari Sistem Informasi Statistik Provinsi Sumatera Barat.

2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk

usia 15-64 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15-64 tahun ke atas.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 48 dimana dari hasil perhitungan diperoleh APAK Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,28 persen, artinya 70,28 persen penduduk usia 15-64 tahun ke atas yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Dari Tabel 48 juga terlihat bahwa penduduk yang berumur 15-19 tahun mempunyai APAK paling rendah yaitu sebesar 23,56 persen, sedangkan penduduk yang berumur 45-49 tahun memiliki APAK paling tinggi yaitu sebesar 88,03 persen.

Tabel 48.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Kecamatan (1990 Tahun)	Angkatan Kerja (Juta)			Jumlah Bukan Angka	Jumlah Tenaga Kerja	APAK
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Lulus			
15-19	92,957	23,442	116,419	79,409	49,028	25,34
20-24	278,325	96,873	345,202	147,845	489,045	70,59
25-29	709,581	25,407	785,788	35,592	481,469	60,04
30-34	353,442	34,234	367,714	90,496	456,286	94,25
35-39	343,288	8,987	352,313	72,499	425,511	82,87
40-44	335,349	4,894	337,849	56,093	346,101	65,54
45-49	317,421	4,994	322,403	43,819	346,724	66,81
50-54	279,754	3,972	282,626	46,548	329,174	65,86
55-59	224,294	4,640	229,174	58,407	247,581	70,69
60-64	154,601	8,333	162,931	323,791	496,730	72,83
Jumlah	2.924.753	172.278	3.105.031	1.722.811	3.432.862	70,29

Sumber: | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (DITENKERIT) (Data Sensus 2020)

3) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu.

Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 49, dimana dapat diketahui bahwa persentase jenis pekerjaan terbanyak yang menjadi sumber pendapatan penduduk Sumatera Barat adalah

wiraswasta sebesar 30,10 persen, diikuti oleh jenis pekerjaan pertanian/peternakan sebesar 21,58 persen.

Dari proporsi jenis pekerjaan tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk Sumatera Barat memiliki karakteristik tersendiri dalam memilih pekerjaan sebagai sumber pendapatannya yaitu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan individu dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Kebanyakan pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan dibidang yang menawarkan jasa dan perdagangan. Namun demikian, dengan persentase yang relatif masih cukup besar yaitu lebih dari sepertiga penduduk bekerja yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan, maka dapat juga dikatakan masyarakat Sumatera Barat masih merupakan bagian dari masyarakat agraris.

Jika dilihat proporsi per wilayah Kabupaten/Kota jenis pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan penduduk untuk wilayah Kabupaten lebih banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan dibidang pertanian/peternakan, selanjutnya diikuti oleh penduduk yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman yang telah didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan dibidang wiraswasta. Sementara di tujuh Kota yang ada di Sumatera Barat, penduduknya lebih banyak memiliki jenis pekerjaan sebagai wiraswasta dan aparatur/ pejabat negara.

Artinya di daerah perkotaan penduduk sudah mulai meninggalkan jenis pekerjaan yang bersifat agraris, kecuali di dua daerah kota yaitu Kota Sawahlunto sebesar 9,53 persen dan Kota Payakumbuh sebesar 8,43 persen penduduknya relatif masih cukup banyak yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan.

Tabel 49. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Penelitian Menurut Jenis Pekerjaan																								
		Jumlah Pekerja Bekerja		Tenaga Pengerja		Majikan		Karyawan/Pejabat		Sesama		Adanya/Keperawatan		Kerabat		Lainnya		Jumlah		Persentase						
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%			
1001	Kabupaten Padang Jajar	8.666	2,36	2.791	0,63	33.310	14,26	81.309	27,89	12.455	4,29	62	0,02	917	0,26	133.789	43,31	260.779								
1002	Kabupaten Padang	6.836	3,12	1.771	0,41	45.729	20,34	79.264	25,43	1.36	0,00	35	0,02	428	0,12	181.666	41,31	219.447								
1003	Kabupaten Singaming	4.827	3,21	1.660	1,23	28.868	21,23	62.760	32,43	24	0,00	35	0,01	471	0,16	53.625	41,64	131.980								
1004	Kabupaten Tanah Datar	8.022	3,25	2.467	1,26	38.125	27,65	53.280	34,27	342	0,14	136	0,05	666	0,30	181.700	42,18	213.128								
1005	Kabupaten Padang Pariaman	7.960	3,39	1.969	0,66	48.770	33,42	38.293	24,02	1.966	0,29	4.01	0,14	332	0,22	131.427	47,18	243.677								
1006	Kabupaten Agul	10.836	3,29	4.132	1,49	45.942	31,32	39.253	23,28	2.811	0,63	84	0,04	789	0,27	133.896	41,38	277.840								
1007	Kabupaten Lempur Tengah	7.601	3,26	1.421	0,41	58.181	25,13	62.944	27,22	43	0,00	37	0,01	479	0,18	118.665	43,31	211.540								
1008	Kabupaten Pasaman	6.774	3,27	1.574	0,69	27.792	17,17	41.833	30,38	33	0,00	20	0,01	349	0,31	44.198	37,36	141.788								
1009	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.388	4,03	912	1,03	6.212	12,47	11.641	20,36	7.573	15,21	149	0,34	241	0,27	28.236	40,34	69.770								
1010	Kabupaten Dharmasraya	4.348	3,22	2.284	1,55	43.509	31,20	31.664	24,33	28	0,02	39	0,02	732	0,34	52.732	38,31	128.882								
1011	Kabupaten Solok Selatan	4.234	4,24	64	0,22	23.130	14,23	27.484	28,38	19	0,02	12	0,01	244	0,41	38.229	41,10	65.238								
1012	Kabupaten Pasaman Barat	6.678	2,81	3.304	1,47	38.653	22,65	29.839	13,39	3.046	2,33	46	0,02	1.229	0,23	68.347	37,36	233.540								
1013	Kota Padang	41.116	9,34	12.431	3,22	222.364	43,00	18.412	2,11	3.473	1,11	229	0,01	4.131	0,64	294.329	39,12	492.419								
1014	Kota Solok	8.798	11,05	364	1,31	28.241	44,71	2.207	4,49	7	0,02	29	0,04	227	0,27	13.176	30,29	43.328								
1015	Kota Sawahlangu	5.134	8,43	453	1,19	15.229	46,44	3.967	3,13	1	0,00	19	0,07	172	0,46	14.944	34,64	27.630								
1016	Kota Padang Panjang	5.339	11,66	1.076	1,13	15.882	47,89	1.479	4,48	3	0,01	41	0,12	119	0,36	18.022	12,45	31.125								
1017	Kota Bukittinggi	6.395	8,27	2.057	2,73	48.939	34,84	1.342	3,27	12	0,02	47	0,04	291	0,09	23.031	11,70	54.384								
1018	Kota Payakumbuh	6.522	8,21	1.288	1,62	34.738	43,79	6.206	6,65	13	0,00	28	0,04	444	0,34	28.792	17,42	79.489								
1019	Kota Pesisir	5.292	10,36	869	1,03	23.798	48,74	2.888	3,01	1.292	1,62	33	0,11	635	0,64	22.139	40,20	52.452								
	Provinsi Barat	110.024	4,85	33.633	1,43	322.969	30,38	148.399	17,38	37.734	1,12	1.235	0,08	14.902	0,45	1.180.366	40,34	2.284.571								

Sumber: Data Kecamatan Bekerja (DKB) Kecamatan II Tahun 2024 (Estimasi)

4) Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, *trend* indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 50 berikut ini :

Tabel 50.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jumlah)			Jumlah Bekerja Angkatan	Jumlah Tanpa Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah			
15-19	92.957	23.842	116.819	378.209	494.928	20,23
20-24	279.329	66.873	346.202	143.843	489.943	15,37
25-29	350.381	35.407	385.788	85.892	471.680	9,18
30-34	331.462	38.256	369.718	90.490	459.208	4,42
35-39	342.705	6.907	349.612	72.694	422.311	2,31
40-44	333.549	4.999	338.548	38.053	396.601	3,21
45-49	317.423	4.994	322.417	43.819	366.234	1,33
50-54	278.754	3.872	282.626	46.548	329.174	1,17
55-59	224.294	4.900	229.194	38.407	267.601	2,13
60-64	154.803	8.338	163.141	323.791	486.730	2,30
Jumlah	2.924.733	173.626	3.098.359	1.332.051	4.430.410	3,74

Sumber: DSK Sumatera II Tahun 2024 (dibalek)

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Pada Tabel 50

terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,75 persen, artinya 5,75 persen penduduk berusia 15 tahun keatas berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif. Angka pengangguran terbesar terlihat pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 20,29 persen, sedangkan yang terkecil adalah pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebesar 1,21 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang lebih luas khususnya bagi penduduk yang baru lulus SLTA atau perguruan tinggi baik lulusan DI/D3/D4/ maupun Sarjana.

d. Sosial

1) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data PSKS Merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga. (Peraturan Menteri Sosial RI No.5 Tahun 2019 dan perubahannya No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tabel 51.
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Tenaga Masyarakat	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	KARANG TARUNA	TAGANA	Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial
1	Kab. Pesisir Selatan	192	15	53	33	6
2	Kab. Solok	74	14	24	31	4
3	Kab. Panguruh	62	6	60	18	2
4	Kab. Tanah Datar	725	14	90	22	13
5	Kab. Padang Panjang	33	17	68	23	11
6	Kab. Agam	344	16	62	14	20
7	Kab. Limapuluh Kota	60	13	70	12	9
8	Kab. Pesisir	35	12	21	14	4
9	Kab. Kep. Mentawai	38	10	43	20	2
10	Kab. Dharmasraya	52	11	31	20	2
11	Kab. Solok Selatan	34	7	9	21	2
12	Kab. Pasirjajar	51	11	34	18	5
13	Kota Padang	310	31	104	217	23
14	Kota Solok	52	2	13	20	2
15	Kota Sawahlunto	35	4	37	23	2
16	Kota Padang Panjang	92	2	16	23	3
17	Kota Bukittinggi	120	3	24	26	3
18	Kota Payakumbuh	165	3	61	15	2
19	Kota Pariaman	87	4	71	22	4
SUMATERA BARAT		2.031	179	604	584	125

Sumber : Data Sosial Potensial Sumatera Barat (diteliti)

Dari tabel 51 dilihat bahwa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari Perseorangan dan Lembaga. Untuk PSKS Perseorangan terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 2.031 jiwa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 179 jiwa, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 604 jiwa, Karang Taruna sebanyak 954 jiwa, sedangkan dari lembaga yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial sebanyak 125 lembaga

Tabel 52
Penerima Bantuan Sosial
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako	Program Keluarga Harapan
1	Kab. Pasisir Selatan	102.127	36.239	19.829
2	Kab. Solok	129.089	25.357	16.318
3	Kab. Sijunjung	74.820	14.186	9.545
4	Kab. Tanah Datar	111.901	21.703	15.049
5	Kab. Padang Pariaman	161.390	25.863	18.955
6	Kab. Agam	187.357	23.882	20.873
7	Kab. Limapuluh Kota	168.194	36.808	22.708
8	Kab. Pasaman	136.128	26.188	15.012
9	Kab. Kep. Mentawai	47.346	6.039	6.311
10	Kab. Dharmasraya	58.677	11.257	6.940
11	Kab. Solok Selatan	54.063	9.930	6.177
12	Kab. Pasaman Barat	136.549	30.583	17.771
13	Kota Padang	256.824	155.799	22.740
14	Kota Solok	14.224	3.578	2.111
15	Kota Sawahlunto	8.523	1.382	1.066
16	Kota Padang Panjang	12.456	2.052	1.096
17	Kota Bukittinggi	23.640	3.822	2.235
18	Kota Payakumbuh	33.133	4.778	3.743
19	Kota Pariaman	38.670	4.140	3.188
SUMATERA BARAT		1.764.649	439.554	212.287

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (2024)

Dari Tabel 52 dilihat Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 1.764.649, bantuan pangan non tunai/ sembako sebanyak 439.554 dan program keluarga harapan sebanyak 212.287.

2) Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi disabilitas dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah penduduk penyandang disabilitas menurut jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 53, yang menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk disabilitas di Provinsi Sumatera Barat, penduduk disabilitas mental/jiwa mental yang terbanyak yaitu sebesar 8.444 jiwa (52,28 persen), diikuti oleh disabilitas rungu/ wicara sebanyak 2.372 jiwa (14,69 persen), sedangkan yang terkecil adalah disabilitas netra/buta yaitu sebesar 1.010 jiwa (6,25 persen).

Tabel 53.
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No.	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Disabilitas Tuli	1.281	13,11	889	15,00	2.270	14,07
2	Disabilitas Netra/Buta	569	5,82	441	4,91	1.010	6,25
3	Disabilitas Rungu/Wicara	1.252	12,81	1.120	17,55	2.372	14,69
4	Disabilitas Mental/Jiwa	5.524	56,74	2.920	45,75	8.444	52,28
5	Disabilitas Tuli dan Mental	391	4,05	423	6,63	1.014	6,28
6	Disabilitas Lainnya	353	3,66	489	7,26	1.042	6,45
	Jumlah	9.770	100	6.392	100	16.162	100

Sumber : Data Konsolidasi BPS (DKB) Semester II 2024 (disolah)

Sementara itu, untuk angka disabilitas menurut kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 54 dimana angka penduduk disabilitas di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,28 persen, artinya bahwa sebagian kecil penduduk di Provinsi Sumatera Barat penyandang disabilitas.

Namun ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Bila diklasifikasikan menurut kabupaten/kota, maka angka disabilitas terbesar berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 0,59 persen, diikuti oleh Kota Sawahlunto sebesar 0,58 persen serta Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok sebesar 0,51 persen. Sedangkan angka disabilitas yang terkecil berada di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,10 persen.

Angka disabilitas ini bisa saja terjadi peningkatan setiap tahunnya bila penduduk sudah semakin sadar untuk melakukan pembaharuan data dan dapat memberikan data yang sebenarnya, termasuk untuk kondisi disabilitas bila memang penduduk tersebut adalah disabilitas. Untuk itu, sangat diperlukan peran serta pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota serta semua pihak terkait agar disabilitas tetap mendapatkan pelayanan terbaik dalam semua aspek kehidupannya termasuk menyiapkan semua fasilitas penunjang yang dapat mempermudah para disabilitas, khususnya di kantor-kantor/instansi pelayanan publik.

Tabel 54.
Angka Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten	Jumlah Penyandang Disabilitas						Jumlah Penyandang Disabilitas	%	
		Orang cacat fisik	Orang cacat mental	Orang cacat intelektual	Orang cacat sensoris	Orang cacat multi	Orang cacat lainnya			
01	Kabupaten Agul-Agul	48	21	41	41	20	89	1.31	11.94	4.3
02	Kabupaten Arif	24	41	34	34	21	48	20	81.87	8.0
03	Kabupaten Batusangkar	42	41	41	34	21	74	48	20.42	4.8
04	Kabupaten Bukit Barisan	21	41	24	24	41	41	1.81	31.47	4.4
05	Kabupaten Padang Panjang	14	41	14	14	41	14	1.21	48.51	4.2
06	Kabupaten Padang	21	41	21	21	41	21	1.81	31.24	4.2
07	Kabupaten Pasia Raja Raja	41	41	41	41	21	34	74	41.74	4.4
08	Kabupaten Payakumbuh	21	41	21	21	41	21	1.41	31.47	4.2
09	Kabupaten Pang. Jemberati	14	14	14	14	14	14	1.14	11.47	4.1
10	Kabupaten Pematangsari	41	41	41	21	41	14	21	24.44	4.3
11	Kabupaten Pesisir Selatan	41	41	14	21	41	41	41	31.71	4.3
12	Kabupaten Pesisir Tengah	14	14	14	14	41	41	41	41.47	4.1
13	Kota Padang	21	21	21	1.14	41	21	1.14	41.44	4.2
14	Kabupaten Padang Lawas	21	21	41	34	14	21	21	31.44	4.1
15	Kota Padangsidik	41	14	41	41	14	14	21	41.44	4.4
16	Kota Padangpanjang	14	14	41	14	14	14	14	11.44	4.2
17	Kota Padangroang	14	14	14	14	14	14	14	11.44	4.1
18	Kota Pagarjajar	14	14	14	14	14	14	14	11.44	4.1
19	Kota Payakumbuh	14	14	14	14	14	14	14	11.44	4.1
	Sumatera Barat	421	441	441	441	441	441	441	421.44	4.4

Sumber: Data Kelembagaan Kesejahteraan (DKK) Provinsi Sumatera Barat

3. Mobilitas Penduduk

a. Mobilitas Permanen

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari Provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan.

Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

- 1) Migrasi Masuk (Mi).
- 2) Migrasi Keluar (Mo).
- 3) Migrasi Neto (Mn).
- 4) Migrasi Bruto (Mb).
- 5) Persentase migrasi dari perdesaan ke perkotaan.

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (kabupaten/kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

1) Angka Migrasi Masuk (*in-migration*/Mi)

Angka migrasi masuk per kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 55 adalah sebesar 15,78, ini berarti selama tahun 2024 ada sebanyak 15-16 orang penduduk yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat per 1.000 penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 55.
Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jawa)			Angka Migrasi Masuk
		Data Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk		
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	531.084	2.260	4.577	12,87
2	Kabupaten Solok	410.750	2.564	2.724	5,288
3	Kabupaten Sijunjung	245.833	1.571	1.241	2,812
4	Kabupaten Tanah Datar	381.701	2.633	3.948	8,479
5	Kabupaten Padang Pariaman	456.764	2.826	5.054	7,880
6	Kabupaten Agam	531.688	4.066	5.250	9,313
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	480.226	1.261	2.468	4,728
8	Kabupaten Pasaman	311.020	1.168	2.168	3,334
9	Kabupaten Kep. Mentawai	36.433	382	293	673
10	Kabupaten Dharmasraya	238.958	1.907	2.730	4,897
11	Kabupaten Solok Selatan	182.045	1.171	1.055	2,228
12	Kabupaten Pasuruan Barat	449.746	2.099	2.903	5,005
13	Kota Padang	940.913	8.456	6.222	14,878
14	Kota Solok	84.016	1.640	718	3,358
15	Kota Sawahlunto	66.471	334	435	969
16	Kota Padang Panjang	63.313	1.260	473	1,733
17	Kota Bukittinggi	140.189	3.238	1.050	4,321
18	Kota Payakumbuh	147.925	2.307	1.311	2,618
19	Kota Parung	102.758	1.975	1.134	3,128
	Sumatera Barat	5.335.348	47.575	45.735	9,296

Sumber : DKB II Tahun 2023 dan DKB II Tahun 2024 (Midi)

Sedangkan untuk kabupaten/kota, angka migrasi masuk tertinggi berada di Kota Solok yaitu sebesar 39,97 yang berarti selama tahun 2024 ada sebanyak 39-40 orang penduduk yang masuk ke Kota Solok per 1.000 penduduk yang ada di Kota Solok. Sementara itu, angka migrasi masuk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya sebesar 7,00, ini berarti pada tahun 2024 hanya sebanyak 7 orang penduduk yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingginya angka migrasi masuk ke Kota Solok ini disebabkan karena Kota Solok merupakan salah satu Kota dengan jumlah penduduk terkecil ketiga setelah Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto dengan luas wilayah yang hanya terdiri dari 2 Kecamatan, dan merupakan salah satu daerah yang fasilitasi pemerintahan dari sektor pendidikan memberikan biaya pendidikan gratis dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pemerintah kota Solok juga memberikan program berobat gratis bagi masyarakatnya. Kota Solok juga dengan motto daerahnya Serambi Madinah dan kota beras, selain itu menjadi tujuan wisata kuliner di Provinsi Sumatera Barat sehingga peluang kerja di sektor pariwisata di Kota Solok ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk bisa tinggal dan bekerja di Kota Solok.

2) Angka Migrasi Keluar (*out-migration/Mo*)

Angka migrasi keluar per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 56 adalah sebesar 19,73 yang berarti pada tahun 2024, ada sebanyak 19-20 penduduk yang keluar dari Provinsi Sumatera Barat dari 1.000 penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, angka migrasi keluar terbesar sebagaimana terlihat pada tabel tersebut terdapat pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 29,93, dimana ini berarti pada tahun 2024 ada sebanyak 29-30 orang penduduk yang keluar dari Kabupaten Padang Pariaman dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sedangkan angka migrasi keluar terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 10,14,

dimana berarti selama tahun 2024 terdapat 10-11 orang penduduk yang keluar (pindah) dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 1.000 penduduk yang ada di Kepulauan Mentawai.

Tabel 56.
Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Orang)			Angka Migrasi Keluar
		Pada Perangahan Tahun	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	Kabupaten Pasaman Selatan	521.084	2.857	6.129	8.986
2	Kabupaten Solok	410.750	4.244	3.892	8.296
3	Kabupaten Sijunjung	245.832	1.663	2.085	3.688
4	Kabupaten Tanah Datar	343.701	3.279	3.251	6.530
5	Kabupaten Padang Pariaman	456.764	6.435	9.236	15.671
6	Kabupaten Agul	521.681	5.381	7.188	12.569
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	400.236	2.691	3.743	6.432
8	Kabupaten Pasaman	315.520	2.734	3.779	6.513
9	Kabupaten Kep. Mentawai	96.433	401	497	898
10	Kabupaten Dharmasraya	239.958	1.482	2.847	4.329
11	Kabupaten Solok Selatan	182.049	1.849	1.434	3.287
12	Kabupaten Pasaman Barat	449.788	2.522	4.189	6.711
13	Kota Padang	940.915	7.271	10.040	17.486
14	Kota Solok	84.018	1.288	869	2.138
15	Kota Sawahlangu	48.471	899	736	1.635
16	Kota Padang Panjang	62.313	794	734	1.518
17	Kota Bukittinggi	140.140	1.886	1.533	3.422
18	Kota Payakumbuh	147.825	1.663	1.533	3.226
19	Kota Pariaman	102.758	1.000	1.373	2.373
	Sumatera Barat	5.705.341	47.244	66.977	114.185

Sumber : DKB II Tahun 2023 dan DKB II Tahun 2024 (Bakal)

Tingginya angka migrasi keluar dari Kabupaten Padang Pariaman ini disebabkan karena lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang dekat dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, migrasi juga dilakukan

keluar Provinsi Sumatera Barat (merantau) ke tempat sanak saudara yang telah berhasil (faktor budaya).

Sementara rendahnya angka migrasi keluar dari Kabupaten Kepulauan Mentawai disebabkan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya pindah ke Kecamatan lain masih dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3) Angka Migrasi Neto (*nett-migration/Mn*)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar, dimana apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Angka migrasi neto per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 57, dimana dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Migrasi Neto Positif, dimana 5 (lima) diantaranya adalah daerah Kota, sedangkan 1 (satu) Kabupaten. Untuk Angka Migrasi Neto Negatif terdapat 13 Kabupaten/Kota, dimana 11 (sebelas) diantaranya adalah daerah Kabupaten dan 2 (dua) daerah Kota. Dari kedua hal ini kembali menunjukkan bahwa Kota masih memiliki daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik dari sisi kesempatan kerja yang lebih luas maupun kualitas pendidikan yang lebih baik.

Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Barat, Angka Migrasi Neto adalah negatif, ini berarti lebih banyak penduduk Sumatera Barat yang keluar karena penduduk ingin memperbaiki taraf hidup

menjadi lebih baik dengan merantau ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan hidup.

Tabel 57.
Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jawa)			Angka Migrasi Neto	Jenis Migrasi Neto
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	531.084	4.800	8.976	-4.176	Negatif
2	Kabupaten Solok	410.790	5.788	8.286	-2.500	Negatif
3	Kabupaten Sijunjung	243.653	2.812	3.668	-0.856	Negatif
4	Kabupaten Tanah Datar	303.701	6.479	8.030	-1.551	Negatif
5	Kabupaten Padang Pariaman	496.764	7.680	13.671	-5.991	Negatif
6	Kabupaten Agam	531.688	9.335	12.888	-3.553	Negatif
7	Kabupaten Lintau Puluh Kota	400.238	4.728	6.432	-1.704	Negatif
8	Kabupaten Pasaman	311.020	3.534	5.313	-1.779	Negatif
9	Kabupaten Kep. Mentawai	96.453	675	978	-303	Negatif
10	Kabupaten Dharmasraya	238.958	4.697	4.829	-132	Positif
11	Kabupaten Solok Selatan	182.049	2.228	2.800	-572	Negatif
12	Kabupaten Pasaman Barat	449.746	5.000	6.711	-1.711	Negatif
13	Kota Padang	943.915	14.679	17.486	-2.807	Negatif
14	Kota Solok	84.018	3.358	2.138	1.220	Positif
15	Kota Sawahlunto	66.471	869	1.405	-536	Negatif
16	Kota Padang Panjang	62.313	1.720	1.510	210	Positif
17	Kota Bukittinggi	140.169	4.331	3.437	894	Positif
18	Kota Payakumbuh	147.823	3.638	3.171	467	Positif
19	Kota Paluaman	102.708	3.129	2.279	850	Positif
	Sumatera Barat	5.783.548	91.290	118.165	-26.875	Negatif

Sumber: DKB II Tahun 2021 dan DKB II Tahun 2024 (dibah)

4) Transmigrasi

Beberapa tujuan yang melatar belakangi program atau kegiatan transmigrasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerataan dan persebaran penduduk.
- 2) Peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi.
- 3) Pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi.

Data-data terkait transmigrasi selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 58 dan Tabel 59 yang memperlihatkan data transmigran masuk dan keluar berdasarkan penempatan transmigrasi per kabupaten/kota dan data transmigran masuk dan keluar per kabupaten/kota, data transmigran berdasarkan jenis transmigrasi per kabupaten/kota, dan data transmigran berdasarkan pola transmigrasi per kabupaten/kota.

Dari Tabel 58 dapat dilihat bahwa selama tahun 2024 hanya di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru terdapat transmigran masuk menurut daerah asal yaitu sebanyak 16 KK (54 jiwa). Transmigran tersebut diantaranya berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 7 KK (27 jiwa) dan Provinsi Lampung sebanyak 2 KK (7 jiwa), penduduk setempat 7 KK (20 jiwa), sedangkan untuk transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) sebanyak 3 KK (9 jiwa). Transmigran tersebut berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 58.
Data Transmigran Masuk dan Keluar Berdasarkan Penempatan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Penempatan Transmigrasi					
		Masuk Uluah Asal		Transmigrasi Berakumulasi Mendiri (TSSB)		Pada Transmigrasi POKPER BUN dan PDR-SCB	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Kabupaten Pasiah Salatan	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Solok	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	19	63	3	9	-	-
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Limau Paluh Kota	-	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Kpg. Mentawai	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sawahlangu	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-
19	Kota Paluhawan	-	-	-	-	-	-
	Sumatera Barat	19	63	3	9	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (2024)

Sama halnya dengan data pada Tabel 58, pada Tabel 59 juga memperlihatkan jumlah transmigrasi yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat ada sebanyak 19 KK (63 jiwa) dan seluruhnya ditempatkan di Kabupaten Sijunjung yaitu di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, sementara untuk transmigrasi keluar selama tahun 2024 tidak ada.

Tabel 59.
Data Transmigran Masuk dan Keluar
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Transmigrasi	
		Masuk	Keluar
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-
2	Kabupaten Solok	-	-
3	Kabupaten Sijunjung	19 KK/63 jiwa	-
4	Kabupaten Tanah Datar	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-
6	Kabupaten Agam	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-
9	Kabupaten Kep. Meritawai	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-
13	Kota Padang	-	-
14	Kota Solok	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-
19	Kota Pariaman	-	-
	Sumatera Barat	19 KK/63 jiwa	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Sementara itu, pada Tabel 60 dapat dilihat jumlah transmigran berdasarkan jenis transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024 yaitu sebanyak 19 KK (63 jiwa) yang keseluruhnya ditempatkan di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, dan merupakan transmigran dengan jenis transmigrasi umum yaitu program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan

transmigrasi swakarsa mandiri yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung sendiri oleh transmigran.

Tabel 60.
Transmigran Berdasarkan Jenis Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jenis Transmigrasi									
		Swakarsa Berencana		Swakarsa Mandiri		Transmigrasi Umum		Transmigrasi Khusus		TOTAL	
		KK	Jms	KK	Jms	KK	Jms	KK	Jms	KK	Jms
1	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Tanah Sembilan	-	-	-	-	20	74	-	-	20	74
5	Kabupaten Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Agul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Agul-Mandailing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Solokmadya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Barat	-	-	2	4	20	74	-	-	22	78

Sumber: Dinas Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat (2024)

Pada Tabel 61 dapat diketahui jumlah transmigran berdasarkan pola transmigrasi tidak ada di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024.

Tabel 61.
Transmigran Berdasarkan Pola Transmigrasi
Per Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Pola Transmigrasi					Status Transmigran Sesuai RTRH
		Pertanian Tanaman Tinggi	Pemuk- bunan	Pemuk- nikahan	Pemuk- nikahan =	Lain- lain Sesuai	
1	Kabupaten Empat Selatan	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Sijunjung	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Solok	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Tanah Datar	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Padang Pariaman	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Agam	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Pasaman	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Dharmasraya	0	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Solok Selatan	0	0	0	0	0	0
12	Kabupaten Pasaman Barat	0	0	0	0	0	0
13	Kota Padang	0	0	0	0	0	0
14	Kota Solok	0	0	0	0	0	0
15	Kota Sawahlunto	0	0	0	0	0	0
16	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	0	0
17	Kota Bukittinggi	0	0	0	0	0	0
18	Kota Payakumbuh	0	0	0	0	0	0
19	Kota Pariaman	0	0	0	0	0	0
	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (2024)

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase kepemilikan kartu keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Kartu Keluarga.

Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 62, dimana dapat dilihat persentase kepemilikan kartu keluarga dari jumlah keluarga yang

ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar 99,51 persen dengan persentase terbesar berada di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 99,76 persen, sementara persentase terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 98,88 persen.

Tabel 62
Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Kepemilikan KK	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	166.743	166.151	99,64
2	Kabupaten Solok	128.168	127.527	99,50
3	Kabupaten Sijunjung	76.106	75.925	99,76
4	Kabupaten Tanah Datar	125.841	125.388	99,63
5	Kabupaten Padang Pariaman	141.780	141.338	99,67
6	Kabupaten Agam	164.558	163.777	99,53
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	134.363	133.121	99,08
8	Kabupaten Pasaman	94.144	93.419	99,23
9	Kabupaten Kep. Mentawai	27.239	27.429	98,88
10	Kabupaten Dharmasraya	73.938	73.500	99,42
11	Kabupaten Solok Selatan	55.157	54.781	99,32
12	Kabupaten Pasaman Barat	131.482	131.008	99,64
13	Kota Padang	294.936	293.456	99,50
14	Kota Solok	23.366	23.271	99,62
15	Kota Sawahlumun	21.017	21.455	99,67
16	Kota Padang Panjang	19.102	19.052	99,74
17	Kota Bukittinggi	42.130	42.070	99,69
18	Kota Payakumbuh	45.706	45.506	99,56
19	Kota Pariaman	31.540	31.452	99,72
	Sumatera Barat	1.304.828	1.298.879	99,51

Sumber: Data Komisioner Beroch (DKB) Sumatera II 2024 (MoMo)

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki KTP-el.

Pada Tabel 63 dapat dilihat bahwa kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar 98,67 persen dari total wajib KTP yang ada, dimana kepemilikan KTP-el tertinggi berada di Kota Padang dengan capaian 99,60 persen dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian baru sebesar 97,20 persen.

Tabel 63
Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Wajib KTP (Dwa)	Kepemilikan KTP-el (Dwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	379.727	378.152	99,59
2	Kabupaten Solok	294.222	290.439	98,71
3	Kabupaten Sijunjung	176.291	171.695	97,39
4	Kabupaten Tanah Datar	287.235	281.706	98,08
5	Kabupaten Padang Pariaman	312.257	323.465	97,35
6	Kabupaten Agam	390.948	381.125	97,49
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	297.971	294.612	98,87
8	Kabupaten Pasaman	220.426	215.754	97,88
9	Kabupaten Kep. Mentawai	67.979	66.073	97,20
10	Kabupaten Dharmasraya	171.221	169.194	98,82
11	Kabupaten Solok Selatan	127.161	125.910	99,02
12	Kabupaten Pasaman Barat	308.375	306.630	99,50
13	Kota Padang	662.014	679.303	99,60
14	Kota Solok	59.456	59.012	99,25
15	Kota Sewahlunto	50.097	49.339	98,49
16	Kota Padang Panjang	45.231	44.840	99,14
17	Kota Bukittinggi	100.243	99.684	99,39
18	Kota Payakumbuh	106.132	105.272	99,18
19	Kota Pariaman	74.138	73.173	98,70
	SUMATERA BARAT	4.171.166	4.115.580	98,67

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2024 (Juli-Des)

Dari Tabel 63 juga dapat dilihat bahwa capaian kepemilikan KTP-el untuk Kota secara umum lebih tinggi bila dibandingkan dengan

kabupaten. Hal ini dapat dipahami karena jumlah penduduk dan cakupan wilayah kota lebih kecil bila dibandingkan Kabupaten. Meskipun seluruh kabupaten telah melakukan pelayanan keliling jemput bola, namun capaiannya masih belum bisa melewati capaian yang dimiliki oleh kota secara umum. Untuk itu, kabupaten harus bisa meningkatkan lagi inovasi-inovasi pelayanannya agar capaian kepemilikan KTP-el nya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya untuk mengejar target wajib KTP yang ada agar semua wajib KTP dan Pemula memiliki KTP-el.

Bila dibandingkan dengan capaian kepemilikan KTP-el tahun 2024 yang sebesar 98,67 persen, terjadi kenaikan capaian Kepemilikan KTP-el sebesar 2,43 % pada tahun 2024 ini dikarenakan target kepemilikan KTP-el tidak hanya bagi semua wajib KTP tetapi juga bagi wajib KTP Pemula.

c. Kepemilikan Akta

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki akta kelahiran per 31 Desember 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 64, yaitu hanya sebesar 55,55 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Namun, capaian persentase kepemilikan akta lahir penduduk tahun 2024 ini, mengalami progres kenaikan 1,43 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang memiliki capaian presentase kepemilikan sebesar 54.12 persen.

Pada Tabel 64 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk tertinggi berada di Kota Padang Panjang dengan capaian sebesar 91,61 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Dharmasraya dengan capaian hanya sebesar 47,07 persen. Angka capaian ini masih sangat rendah dan ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran, khususnya untuk penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas karena mereka merasa tidak lagi memerlukan dokumen akta kelahiran ini.

Tabel 64.
Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Orang)	%
1	Kabupaten Pasisir Selatan	533.784	293.143	54,92
2	Kabupaten Solok	453.073	218.876	48,31
3	Kabupaten Solokjong	347.323	130.835	37,66
4	Kabupaten Tanah Datar	302.674	233.489	77,17
5	Kabupaten Padang Pariaman	408.310	260.043	63,71
6	Kabupaten Agam	533.254	287.650	53,94
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	402.786	204.292	50,72
8	Kabupaten Pasaman	373.872	183.869	49,18
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	97.807	36.412	37,23
10	Kabupaten Dharmasraya	242.192	114.058	47,07
11	Kabupaten Solok Selatan	181.525	97.001	53,44
12	Kabupaten Pasaman Barat	454.053	246.608	54,31
13	Kota Padang	946.982	864.408	91,27
14	Kota Solok	65.353	36.863	56,42
15	Kota Sibolga	68.352	49.041	71,75
16	Kota Padang Panjang	43.895	39.936	91,01
17	Kota Bukittinggi	343.804	312.061	90,74
18	Kota Payakumbuh	249.072	84.084	33,75
19	Kota Parsaman	103.305	43.870	42,47
Sumatera Barat		3.820.319	1.235.481	32,34

Sumber : Data Kemendagri/Perbuk (DIBR) Sumatera © 2024 (pilot)

Untuk kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 65, dimana persentasenya sudah mencapai 98,53 persen dimana mengalami

progres kenaikan sebesar 0,39 persen bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2023 yang sebesar 98,14 persen.

Capaian tertinggi kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun berada di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 99,91 persen, sedangkan capaian terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan capaian kepemilikan hanya 91,22 persen.

Bagi Kabupaten/Kota dengan capaian yang masih jauh dibawah target, agar terus meningkatkan inovasi salah satunya melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah dan rumah sakit dengan harapan target kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun dapat tercapai.

Tabel 65.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Anak 0-17 Tahun (Jumlah)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Jumlah)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	152.582	154.815	98,29
2	Kabupaten Solok	124.024	122.249	98,54
3	Kabupaten Sijunjung	75.663	75.265	99,35
4	Kabupaten Tanah Datar	102.111	101.240	99,14
5	Kabupaten Padang Pariaman	134.703	132.474	98,25
6	Kabupaten Agam	151.808	149.001	98,15
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	111.227	107.049	96,24
8	Kabupaten Pasaman	98.391	96.013	96,60
9	Kabupaten Kep. Mentawai	32.180	29.356	91,22
10	Kabupaten Dharmasraya	24.636	22.517	91,46
11	Kabupaten Solok Selatan	52.469	52.420	99,91
12	Kabupaten Pasaman Barat	149.440	148.247	99,20
13	Kota Padang	273.663	272.411	99,54
14	Kota Solok	27.578	27.414	99,41
15	Kota Sawahlunto	19.705	19.613	99,53
16	Kota Padang Panjang	19.838	19.821	99,91
17	Kota Bukittinggi	44.123	43.354	98,25
18	Kota Payakumbuh	43.583	43.162	99,08
19	Kota Pariaman	31.475	31.123	98,89
	Sumatera Barat	1.732.411	1.706.083	98,53

Sumber: Data Kominfo dan BPS (2023) Sumatera II 2024 (G1614)

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Persentase kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akta perkawinan per 31 Desember 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 66, dimana terlihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan Provinsi Sumatera Barat ini juga sangat kecil yaitu hanya sebesar 72,78 persen.

Namun, capaian ini mengalami progres kenaikan cukup signifikan sebesar 3,29 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 69,49 persen dari jumlah penduduk dengan status kawin.

Tabel 66.
Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Kawin (Jawa)	Kepemilikan Akta Perkawinan (Jawa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	244.084	154.204	63,18
2	Kabupaten Solok	184.857	144.613	77,99
3	Kabupaten Sijunjung	313.754	89.870	27,64
4	Kabupaten Tanah Datar	170.949	136.823	80,03
5	Kabupaten Padang Pariaman	187.619	183.953	97,99
6	Kabupaten Agam	224.241	148.241	65,92
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	189.884	141.468	74,50
8	Kabupaten Pasaman	134.119	84.553	62,96
9	Kabupaten Kep. Mentawai	43.190	25.893	60,06
10	Kabupaten Dharmasraya	117.844	78.790	67,03
11	Kabupaten Solok Selatan	85.254	54.786	64,20
12	Kabupaten Pasaman Barat	199.297	134.307	67,39
13	Kota Padang	427.971	320.184	74,91
14	Kota Solok	37.842	32.984	87,16
15	Kota Sawahlunto	30.654	24.149	78,69
16	Kota Padang Panjang	27.105	25.078	92,52
17	Kota Bukittinggi	81.098	53.619	66,11
18	Kota Payakumbuh	85.314	54.773	64,20
19	Kota Pariaman	42.497	33.635	79,15
	Sumatera Barat	2.589.817	1.884.333	72,78

Sumber: Data Kependudukan Resmi (DKR) Sumbar II 2024 (Hingga)

Capaian yang masih sangat kecil ini disebabkan karena data kepemilikan akta perkawinan ini hanya diperoleh dari database penduduk yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang sifatnya adalah berdasarkan laporan dari penduduk yang melakukan perkawinan, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengeluarkan Akta Perkawinan untuk perkawinan non muslim, maka data kepemilikan akta perkawinan muslim hanya bisa didapat apabila penduduk yang bersangkutan melaporkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari Tabel 66 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 95,09 persen dan terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya sebesar 62,26 persen.

3) Kepemilikan Akta Perceraian

Persentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akta perceraian per 31 Desember 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 67.

Dari Tabel 67 tersebut dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan akta perceraian di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah sebesar 57,14 persen. Capaian ini mengalami progres kenaikan sebesar 3,8 persen bila dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 53,34 persen dari jumlah perceraian hidup yang ada.

Namun angka capaian kepemilikan akta perceraian ini juga masih sangat kecil. Sama halnya dengan kepemilikan akta perkawinan, untuk kepemilikan akta perceraian ini, data juga diperoleh dari penduduk yang melaporkan perceraian. Bila penduduk yang telah bercerai tidak melaporkan perceraian, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan memiliki data terhadap perceraian tersebut, khususnya untuk perceraian penduduk muslim yang dilakukan di Pengadilan Agama, karena Dinas Dukcapil hanya mengeluarkan Akta Perceraian untuk penduduk non muslim.

Tabel 67.
Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup (Jwan)	Kepemilikan Akta Perceraian (Jwan)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.823	2.726	28,33
2	Kabupaten Solok	8.421	4.598	71,61
3	Kabupaten Sijunjung	3.784	1.785	47,42
4	Kabupaten Tanah Datar	8.253	5.580	67,37
5	Kabupaten Pailang Pariaman	10.015	4.380	43,73
6	Kabupaten Agam	11.712	7.370	62,93
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	7.034	5.161	73,37
8	Kabupaten Pasaman	4.831	1.712	36,97
9	Kabupaten Kep. Mentawai	621	133	21,48
10	Kabupaten Dharmasraya	3.247	1.648	50,79
11	Kabupaten Solok Selatan	2.911	1.517	52,11
12	Kabupaten Pasaman Barat	7.364	3.322	45,12
13	Kota Padang	17.445	11.517	66,02
14	Kota Solok	1.297	1.400	77,91
15	Kota Sawahlunto	1.813	1.201	74,48
16	Kota Padang Panjang	1.405	1.004	62,55
17	Kota Bukittinggi	2.880	2.100	72,92
18	Kota Payakumbuh	1.669	2.734	74,24
19	Kota Pariaman	2.167	1.248	57,59
	Sumatera Barat	108.972	61.327	67,14

Sumber: Data Kominfo Barat (DKM) Simonsi 02024/10000

Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa perceraian yang terjadi sehingga bisa dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota.

4) Kepemilikan Akta Kematian

Persentase kepemilikan akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 68 berikut ini :

Tabel 68.
Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2024

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Meninggal (Jum)	Kepemilikan Akta Kematian (Jum)	%
1	Kabupaten Pasia Selatan	3.001	3.001	100
2	Kabupaten Solok	2.811	2.811	100
3	Kabupaten Sijunjung	1.287	1.287	100
4	Kabupaten Tanah Datar	3.370	3.370	100
5	Kabupaten Padang Parsaman	2.955	2.955	100
6	Kabupaten Agam	3.972	3.972	100
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.258	3.258	100
8	Kabupaten Pasaman	2.376	2.376	100
9	Kabupaten Kota, Minangkabau	372	372	100
10	Kabupaten Dharmasraya	1.592	1.592	100
11	Kabupaten Solok Selatan	1.563	1.563	100
12	Kabupaten Pasaman Barat	2.509	2.509	100
13	Kota Padang	5.630	5.630	100
14	Kota Solok	421	421	100
15	Kota Sawahlunto	419	419	100
16	Kota Padang Panjang	395	395	100
17	Kota Bukittinggi	990	990	100
18	Kota Payakumbuh	994	994	100
19	Kota Pariaman	959	959	100
	Sumatera Barat	38.857	38.857	100

Sumber : Data Konsolidasi Resmi (DKR) Sumatera II 2024 (Jalan)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kematian tersebut adalah sebesar 100 persen dari jumlah penduduk mati (meninggal) sampai dengan tahun 2024. Dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota memiliki persentase kepemilikan akta kematian sebesar 100 persen. Hal ini terlihat karena setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kematian akan langsung diterbitkan akta kematiannya.

Untuk data kepemilikan akta kematian ini, diharapkan agar semua penduduk yang mengalami kematian keluarganya dapat segera melaporkan kematian keluarganya tersebut, sehingga semua peristiwa kematian dapat tercatat dan bisa dikeluarkan Akta Kematiannya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Barat, termasuk kesenjangan pembangunan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 yang telah diolah, data perkembangan kependudukan dari kabupaten/kota khususnya untuk data yang terkait migrasi penduduk (pindah dan datang) dan data terkait kematian dan kepemilikan akta kematian, serta data pendukung dari lintas sektor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan disajikan secara berkala. Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang

melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian yang dapat kami susun dan sajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumatera Barat. diambil dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera-Barat>.
2. Potensi Ekonomi Sumatera Barat. diambil dari : www.sumbarprov.go.id/details/news/315.
3. Sektor Pertambangan. diambil dari : www.sumbarprov.go.id/details/news/200.
4. Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat diambil dari : <https://www.ilmupengetahuanumum.com/kabupaten-dan-kota-di-provinsi-sumatera-barat/>.
5. Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2024 diambil dari : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Februari-2025.aspx>
6. Tingkat Penghunian Kamar di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diambil dari : <https://sumbar.bps.go.id/indicator/16/142/3/tingkat-penghunian-kamar-lpk-hotel-di-sumatera-barat-bulanan.html>
7. Jumlah Penumpang Pesawat Terbang Dalam Negeri dan Luar Negeri yang datang dan berangkat di Bandara Internasional Minangkabau menurut bulan (orang) 2024 diambil dari : <https://sumbar.bps.go.id/indicator/17/251/2/jumlah-penumpang-pesawat-terbang-dalam-negeri-dan-luar-negeri-yang-datang-dan-berangkat-di-bandara-internasional-minangkabau-menurut-bulan.html>



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Rasuna Said No.81, Rimbo Kaluang,
Kecamatan: Padang Barat Kota Padang, Sumatera Barat



dinkukapil.sumbarprov.go.id



email : dinkukapil.sumbar@gmail.com



[dinkukapil.sumbar](https://www.instagram.com/dinkukapil.sumbar)



[Dinkukapil Provinsi Sumbar](https://www.facebook.com/DinkukapilProvinsiSumbar)



[dinkukapil.sumbar](https://www.youtube.com/dinkukapilsumbar)